

BAB I

PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan latar belakang penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran teoritis, definisi konsep, definisi operasional dan metodologi penelitian.

Deskripsi ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang alasan, tujuan, teori dan metode penelitian serta berbagai hal yang mendasari adanya kemitraan yang relevan dan sesuai pada penelitian terkait kemitraan antara Desa Dalangan dengan Desa Jimus dan Desa Ngaran dalam Program Pamsimas.

Maka dari itu, penjelasan latar belakang, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran teoritis, definisi konsep, definisi operasional dan metodologi penelitian merupakan data yang didapatkan dari berbagai pihak yang disesuaikan dengan fokus penelitian. Penjelasan terkait perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian sebagai bentuk kebutuhan akademik dari suatu penelitian.

1.1 Latar Belakang Penelitian

Terdapat dua alasan utama yang melatarbelakangi penelitian ini, yaitu alasan teoritik dan alasan empirik. Alasan yang pertama yaitu alasan teoritik yang merupakan landasan dari pentingnya penelitian ini untuk dilakukan. Alasan teoritik berupa hasil atau temuan yang dikemukakan oleh beberapa ahli tertentu. Di antaranya yaitu sebagai berikut:

Pertama, Musselman dan Hughes (1964) mengemukakan pengertian kemitraan :“*an association of two or more persons to carry on as coowners of a bussines for profit*”. Kemudian diterjemahkan oleh Alma (1993) *partnership* adalah suatu asosiasi atau persekutuan dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha mencari keuntungan. Kebijakan kelembagaan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta, merupakan satu sistem yang saling berinteraksi dengan batasan-batasan dan aturan-aturan yang telah disepakati antar berbagai pihak yang bermitra. Dan kemitraan ini dikembangkan dalam kerangka kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki oleh pihak yang bermitra ini. Kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: ada dua pihak atau lebih, memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan, ada kesepakatan dan saling membutuhkan (Utomo, 2017: Vol 6 No. 1).

Kemitraan dalam pembangunan dalam berbagai sektor antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat merupakan strategi yang tepat dalam pembangunan ekonomi daerah untuk dapat dikembangkan dan ditingkatkan pada saat sekarang dan pada masa depan, oleh karena itu perlu dibuat manajemen kemitraan pembangunan di daerah secara terus menerus dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta mengkoordinasikan dan memadukan antar sektor dan antar pihak yang bermitra, sehingga memberikan manfaat dan dampak positif secara terus menerus (*multiplier effects*) yang semakin nyata dan berkualitas. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, selain diperlukan kemitraan dalam

pembangunan kesejahteraan sosial namun diperlukan pula kemitraan dalam pengembangan ekonomi khususnya di daerah. Lingkup bidang pengembangan ekonomi daerah sangat luas meliputi banyak sektor pembangunan, yaitu sektor pembangunan dalam arti luas (meliputi sub-sub sektor perkebunan, pertanian pangan, perikanan, peternakan, dan kehutanan), sektor sarana dan prasarana (seperti irigasi, air bersih, listrik, jalan, dan lainnya), sektor perhubungan (darat, laut, termasuk udara), sektor pertambangan, sektor produksi (investasi), perindustrian, dan pemasaran (perdagangan), sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor permukiman, sektor perkotaan, sektor pedesaan, sektor ketataruangan dan kewilayahan, dan sebagainya.

Kebutuhan pembangunan yang harus dilaksanakan sangat banyak jumlahnya dan meliputi wilayah yang sangat luas, dan dibutuhkan anggaran yang sangat besar sedangkan (a) kemampuan keuangan pemerintah daerah yang masih relatif terbatas, (b) kapasitas sumber daya manusia daerah masih relatif lemah dan kurang profesional, (c) tersedianya jaringan prasarana dan sarana antar daerah/wilayah masih perlu dikembangkan untuk meningkatkan aksesibilitas, (d) demikian pula ketersediaan fasilitas penunjang lainnya. Beban yang harus dipikul oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya sangat berat. Kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat kecil, anggaran pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat terbatas, pada umumnya lebih kecil dibandingkan dengan anggaran rutin. Hampir semua pemerintah daerah (kabupaten/kota) mengandalkan pada Dana Alokasi Umum (DAU) yang

diberikan oleh pemerintah pusat, yang berarti ketergantungan kepada pemerintah pusat masih sangat kuat. Dalam kondisi seperti ini diperlukan kerjasama, kebersamaan, dan kepedulian (kemitraan) serta peran aktif dan keterlibatan semua pelaku pembangunan (partisipasi) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan antara pihak-pihak yang bermitra, yaitu antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat (Adisasmita, 2011: 151).

Kedua, kemitraan adalah salah satu strategi untuk memberdayakan masyarakat. Paradigma pembangunan yang digunakan sangat menentukan hasil-hasil pembangunan yang diperoleh. Selama ini paradigma yang digunakan dalam pembangunan banyak menunjukkan dominasi peran oleh pemerintah baik dalam merencanakan maupun melaksanakan program. Dalam memahami proses mengembangkan pemberdayaan maka dibutuhkan kemitraan antara pemerintah, rakyat dan sekaligus organisasi non pemerintah yang nantinya akan disebut sebagai agen. Berkenaan dengan pengembangan swadaya masyarakat dalam agenda setting pemberdayaan masyarakat maka dibutuhkan agen seperti LSM, ormas, organisasi profesi, organisasi kepemudaan, organisasi wanita, organisasi lokal perpanjangan tangan pemerintah seperti posyandu, PKK, LMD dsb merupakan organisasi yang sangat dekat dan berhubungan langsung dengan komunitas. Agen dapat lebih memahami *social mapping* dalam komunitas sehingga akan memudahkan untuk melakukan kemitraan dengan masyarakat yang akan diberdayakan (Sulistiyani, 2004: 113, 114, 127).

Ketiga, adanya UU tentang Desa yang menyebutkan bahwa adanya kerjasama antar desa dan pihak ketiga melalui kesepakatan musyawarah antar desa. UU No. 6 Tahun 2014 BAB XI pasal 91 hingga 92 menyebutkan bahwa desa dapat mengadakan kerjasama dengan desa lain dengan tujuan untuk mengembangkan usaha bersama yang dimiliki untuk mencapai nilai ekonomi yang dapat berdaya saing, sebagai kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar desa serta kerjasama dalam bidang keamanan dan ketertiban. Dan pada pasal 93 ayat (1) bahwa “kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.”

Keempat, tumbangnya Orde Baru pada tahun 1998, karena sistem pemerintahan Orde Baru yang sentralistik dianggap tidak baik dan tidak sesuai lagi, karena rencana pembangunan ditetapkan oleh pemerintah pusat, perencanaan dan kebijakan ditentukan dari atas ke bawah (*top-down planning and development*), dapat diinterpretasikan mengekang demokrasi dan aspirasi daerah, dan bahkan menimbulkan kesengsaraan rakyat banyak, oleh karena itu sistem pemerintahan yang sentralistik harus diganti dengan sistem pemerintahan yang desentralistik. Rasa ketidakpuasan rakyat yang dipendam sejak lama, kemudian meletus dalam gerakan reformasi politik menumbangkan pemerintahan Orde Baru, yang berkobar pada pertengahan tahun 1998. Orde Baru berhasil ditumbangkan dan diganti dengan Orde

Reformasi. Presiden Suharto menyerahkan kekuasaannya kepada Wakil Presiden Prof. DR. Ing. B.J. Habibie. Dalam reformasi politik diterapkan tiga prinsip dasar, yaitu demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Demokrasi berarti memberikan kebebasan kepada rakyat. Kepada rakyat diberikan kesempatan menikmati hak dasar rakyat, meliputi (1) hak dasar memperoleh kehidupan yang layak, dalam arti memperoleh pangan, sandang dan papan yang cukup, (2) hak dasar memperoleh lapangan kerja yang layak, (3) hak dasar memperoleh pelayanan pendidikan yang murah, (4) hak dasar memperoleh pelayanan kesehatan yang baik dan murah, (5) hak dasar mengeluarkan pendapat, (6) hak dasar melakukan kegiatan berserikat, (7) hak dasar bebas dari rasa takut, dan (8) hak dasar berpolitik.

Alasan kedua yaitu alasan empirik. Alasan empirik berupa kejadian nyata yang benar-benar terjadi dalam suatu kehidupan yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini. Di antaranya yaitu sebagai berikut:

Pertama, sesuai dengan amanat RPJPN 2005–2025 dan RPJM 2015-2019, Pemerintah melalui program pembangunan nasional '*Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Tahun 2019*', menetapkan bahwa pada tahun 2019, Indonesia dapat menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang layak bagi 100% rakyat Indonesia. Untuk kebutuhan air minum, secara nasional sampai dengan tahun 2015 Indonesia baru mampu menyediakan akses yang layak bagi 68% dari total penduduk Indonesia, sedangkan untuk kebutuhan sanitasi dasar, Indonesia baru mampu menyediakan akses sanitasi layak bagi 60% dari total penduduk Indonesia. Di antara masyarakat yang belum terlayani,

masyarakat berpenghasilan rendah di perdesaan dan *peri-urban* termasuk kelompok yang rentan mengakses air minum dan sanitasi yang layak tersebut.

Kedua, adanya program WSLIC-3/PAMSIMAS merupakan salah satu program dan aksi nyata pemerintah (pusat dan daerah) dengan dukungan Bank Dunia, untuk meningkatkan penyediaan air minum, sanitasi, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama dalam menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan. Tujuan program Pamsimas adalah untuk meningkatkan akses layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan khususnya masyarakat di desa tertinggal dan masyarakat di pinggiran kota atau peri-urban (<http://www.pamsimas.org>). Pelaksanaan Program Pamsimas Tahun 2008-2015 telah berhasil meningkatkan jumlah warga miskin perdesaan dan *peri-urban* yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini telah meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah dan Pemerintah dalam menyediakan dan meningkatkan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi. Program Pamsimas adalah salah satu program andalan Pemerintah di dalam penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat perdesaan melalui pendekatan berbasis masyarakat. Sejak Program Pamsimas mulai dilaksanakan pada tahun 2008 hingga akhir tahun 2015, telah menunjukkan adanya dampak positif bagi masyarakat desa Pamsimas yang tersebar di sekitar 12.000 desa di 233 Kabupaten/Kota di 32

provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta. Sebagai program stimulan dengan pendekatan berbasis masyarakat, Program Pamsimas menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan sekaligus sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan. Program Pamsimas kembali akan dilaksanakan pada tahun 2016-2019 yang merupakan kelanjutan Program Pamsimas 2008-2015, sebagai instrumen pelaksanaan dua agenda nasional untuk meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, yaitu (1) *100%-100% akses air minum dan sanitasi*, dan (2) *Sanitasi Total Berbasis Masyarakat*. Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perdesaan yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target akses air minum dan sanitasi pada tahun 2019 di sektor air minum dan sanitasi, melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat. Program Pamsimas 2016 -2019 rencananya dilaksanakan untuk menunjang pengembangan permukiman yang berkelanjutan di 15.000 desa serta mengelola keberkelanjutan pelayanan air minum dan sanitasi di hampir 27.000 desa peserta Pamsimas.

Ketiga, Desa Dalangan merupakan salah satu desa yang memiliki sumber air. Kemitraan Desa Dalangan dengan Desa Jimus dan Desa Ngaran dimulai sejak masing-masing desa menerima Program Pamsimas. Pada awalnya jaringan perpipaan telah dibangun semenjak Inpres Soeharto kira-kira

pada tahun 1985. Namun karena telah berumur lama, tidak ada pihak yang mengurus bahkan ada oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan kerusakan dengan melubangi jaringan perpipaan untuk tujuan pribadi. Adanya program pamsimas ini membuka kesempatan besar bagi Desa Jimus dan Desa Ngaran untuk mendapatkan air yang bersih. Desa Jimus dan Desa Ngaran termasuk desa yang memiliki sumber air melimpah, namun sebagian besar air tersebut mengandung FE yang akan sangat berbahaya bagi masyarakat untuk digunakan. Sehingga muncullah ide kemitraan dengan Desa Dalangan karena Desa Dalangan memiliki sumber air bersih yang melimpah. Wujud kemitraan ini berupa pendistribusian air dari Desa Dalangan kepada Desa Jimus dan Desa Ngaran, dan kedua desa penerima air tersebut memberikan retribusi kepada Desa Dalangan yang digunakan untuk pengelolaan. Tabel di bawah menunjukkan bahwa Desa Jimus dan Desa Ngaran tidak termasuk daerah 100% akses air minum dan sanitasi karena hingga saat ini selalu dilakukan penambahan SR.

Tabel 1 Tabel Daerah 100% Akses Air Minum

No	Kecamatan	Desa	No	Kecamatan	Desa	No	Kecamatan	Desa
1.	Karanganom	Gledeg	8.	Polanharjo	Nganjat	15.	Jatinom	Kayumas
2.	Polanharjo	Janti	9.	Polanharjo	Polan	16.	Karangnongko	Jiwan
3.	Karangnongko	Kanoman	10.	Polanharjo	Sidowayah	17.	Karangnongko	Logede
4.	Karangdowo	Babadan	11.	Wonosari	Sidowarno	18.	Karangnongko	Ngemplak
5.	Jatinom	Mranggen	12.	Bayat	Jotangan	19.	Jatinom	Randulanang
6.	Prambanan	Cucukan	13.	Kemalang	Bawukan	20.	Trucuk	Trucuk
7.	Polanharjo	Kebonharjo	14.	Jatinom	Beteng	21.	Jatinom	Glagah

Sumber : pamsimas.org

Tabel 2 Tabel Daerah Belum 100% Akses Sanitasi

No.	Kecamatan	Desa	No.	Kecamatan	Desa
1.	Tulung	Kemiri	9.	Jatinom	Glagah
2.	Polanharjo	Sidowayah	10.	Polanharjo	Nganjat
3.	Karangnongko	Kadilajo	11.	Polanharjo	Ngaran
4.	Polanharjo	Sidoharjo	12.	Jatinom	Pandeyan
5.	Kebonarum	Malangjiwan	13.	Polanharjo	Kebonharjo
6.	Kebonarum	Pluneng	14.	Jatinom	Cawan
7.	Polanharjo	Polan	15.	Tulung	Bono
8.	Polanharjo	Janti	16.	Kalikotes	Jimbung

No.	Kecamatan	Desa
17.	Manisrenggo	Sapen
18.	Wedi	Jiwowetan
19.	Bayat	Nengahan
20.	Manisrenggo	Sukorini
21.	Trucuk	Wanglu
22.	Polanharjo	Jimus
23.	Tulung	Gedongjetis
24.	Karangdowo	Demangan

Sumber : Web STBM Indonesia

1.2 Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang empirik dan teoritik yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan program kemitraan antara Desa Dalangan, Desa Jimus dan Desa Ngaran dalam program pamsimas?
2. Apa hasil atau manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat desa yang bersangkutan dari adanya kemitraan dalam penyediaan air minum dan sanitasi di Desa Dalangan, Desa Jimus dan Desa Ngaran?
3. Apa saja kritik yang muncul dalam kemitraan yang dilakukan antara antara Desa Dalangan dengan Desa Jimus dan Desa Ngaran dalam program pamsimas?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendalami pelaksanaan program kemitraan antara Desa Dalangan dengan Desa Jimus dan Desa Ngaran.
2. Untuk mengetahui hasil atau manfaat dari adanya kemitraan dalam penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat desa yang bersangkutan.
3. Untuk mengetahui kritik dari adanya kemitraan yang dilakukan antara Desa Dalangan dengan Desa Jimus dan Desa Ngaran.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian ini meliputi manfaat teoritik dan manfaat praktis.

a. Manfaat teoritik

1. Sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan kemitraan pemerintah dan masyarakat guna tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.
2. Sebagai sumbangan perspektif baru di dalam kajian kemitraan antara pemerintah dan masyarakat khususnya dalam bidang penyediaan pelayanan publik guna pemenuhan kebutuhan masyarakat agar tercapai kesejahteraan dan kemandirian dalam masyarakat.
3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya, terutama penelitian yang berkaitan

dengan kemitraan pemerintah dan masyarakat guna tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

b. Manfaat praktis

1. Memberikan pengetahuan kepada jaringan lain mengenai keberhasilan dari kemitraan antara pemerintah dan masyarakat khususnya dalam penyediaan pelayanan publik.
2. Memberikan masukan kepada badan, organisasi dan pemerintah lain dalam penerapan dan implementasi kemitraan antara masyarakat desa yang bersangkutan.
3. Sebagai input atau bahan masukan untuk perbaikan pengelolaan kemitraan yang berhubungan dengan pelaksanaan kemitraan tersebut sehingga kemitraan selanjutnya dapat tercapai dengan baik dan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka bertujuan untuk mendeskripsikan teori atau kenyataan yang seharusnya dilakukan dalam sebuah penelitian. Tinjauan pustaka yang ditampilkan pada bagian ini berisi penelitian terdahulu dan teori-teori yang telah digunakan berdasarkan literatur yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang ditampilkan pada bagian ini digunakan sebagai referensi untuk membandingkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh pihak lain. Hal yang harus diperhatikan pada penelitian terdahulu meliputi: konsep yang digunakan, metode penelitian, dan hasil penelitian.

Pertama, Adi Sofyan Prasetya (2013), melakukan kajian penelitian terhadap kerjasama antar daerah dalam pengelolaan air bersih. Penelitian ini berjudul: Kerjasama Antar Daerah dalam Pengelolaan Air Bersih: Kabupaten Semarang dan Kota Semarang. Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: kerjasama, kolaborasi dan manajemen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif-analitis yaitu dengan mendeskripsikan dan sekaligus menganalisa gejala yang terjadi dengan cara mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang relevan dengan penelitian ini. Hasil kajian dalam penelitian ini adalah kerjasama antar Kabupaten Semarang dan Kota Semarang dalam pengelolaan air bersih mengedepankan musyawarah sehingga dihasilkan sistem bagi hasil di dalam memanfaatkan air bersih. Pihak Pemerintah Kota Semarang mengambil air di wilayah Kabupaten Semarang, dan pihak Kabupaten Semarang mendapatkan royalty atas pemanfaatan air oleh Kota Semarang (Prasetyo, 2013: Vol 2 No 1).

Kedua, Setiyo Utomo (2017), melakukan kajian penelitian terhadap kerjasama dalam pengembangan desa wisata. Penelitian ini berjudul: Pengembangan Desa Wisata Eramaya Kabupaten Temanggung: Studi Kerjasama Pemerintah & Masyarakat. Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: kerjasama dan pengembangan desa wisata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif-kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan gejala yang terjadi dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara dan studi kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini. Hasil kajian dalam penelitian ini adalah program untuk mengembangkan Desa Wisata Eramaya telah dicanangkan oleh pemerintah. Program tersebut berupa pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia terhadap kelompok sadar wisata Eramaya. Namun ada beberapa kendala di dalam melaksanakan program yaitu ketersediaan anggaran oleh pemerintah dan masih rendahnya kualitas sumber daya dari masyarakat sehingga diperlukan kerjasama antar pemerintah dan masyarakat melalui kelompok sadar wisata Eramaya dan selanjutnya akan berupaya untuk bekerjasama dengan pihak ketiga di dalam pengembangan desa wisata namun belum ada pihak swasta yang bergabung (Utomo, 2017: Vol 6 No. 1).

Ketiga, Erna Kurnia (2017), melakukan kajian penelitian terhadap kemitraan antara LSM dan masyarakat untuk mencapai pemberdayaan. Penelitian ini berjudul: Pola Kemitraan Yayasan Obor Tani (Lsm) Dan Masyarakat Dalam Memberdayakan Petani Desa Wonokerto Kabupaten

Semarang (Periode 2009-2013). Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: kemitraan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan gejala yang terjadi dengan menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil kajian dalam penelitian ini menunjukkan berbagai manfaat yang diterima oleh pihak yang terlibat di dalam kemitraan ini. Bagi masyarakat, kemitraan yang telah dilakukan selama 3,5 tahun memberikan dampak positif bagi peningkatan penghasilan melalui budi daya buah naga, pembangunan waduk mini dan pembangunan wisma pelatihan. Sedangkan bagi LSM, pemberdayaan yang dilakukan di dalam kemitraan ini akan meningkatkan nilai tambah atas pertanggungjawabannya kepada pihak yang memberikan donasi yaitu PT Pertamina yang diharapkan akan terus dapat menjalin kemitraan selanjutnya bersama perusahaan-perusahaan besar lainnya melalui program CSR. Keberhasilan dalam memproduksi buah naga yang berkualitas akan menambah persediaan buah naga yang berkualitas untuk Hortimart Agro Center dan toko buah lainnya sehingga tidak perlu melakukan impor. Bagi pemerintah yaitu akan membantu pemerintah dalam penyediaan lapangan pekerjaan sebagai upaya pengentasan kemiskinan sesuai dengan MDG's (Kurnia, 2017: Vol 6 No. 2).

Keempat, Muhammad Faiz Ilham (2016), melakukan kajian penelitian terhadap bentuk kerjasama pemanfaatan air bersih yang

dilakukan oleh kedua daerah, serta realisasi dari kerjasama tersebut. Penelitian ini berjudul: Kerjasama Pemanfaatan Air Bersih antara Kabupaten Semarang dengan Kota Semarang Tahun 2013-2015. Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: kerjasama antar daerah dan pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara sebagai data primer dan dokumen sebagai data sekunder yang relevan dengan penelitian ini. Hasil kajian dalam penelitian ini menunjukkan meskipun pada tahun 2004 kerjasama ini telah dilaksanakan dan pada tahun 2013 telah diresmikan namun kerjasama dalam pemanfaatan air antara Kota Semarang dan Kabupaten Semarang pada tahun 2013-2015 belum bekerja secara optimal karena kendala masalah antara kedua daerah tersebut (Ilham, 2016: Vol 5 No. 4).

Kelima, Frita Aprilia Hapsari (2017), melakukan kajian penelitian terhadap kemitraan dalam pengelolaan eco edukasi wisata. Penelitian ini berjudul: Pola Kemitraan Antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Dan Kelompok Prenjak Dalam Pengelolaan Eco Edukasi Wisata Desa Tapak Kota Semarang Tahun 2016. Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: kemitraan, *civil society* dan capital sosial pelestarian lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan gejala yang terjadi. Hasil kajian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pola kemitraan antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dan Kelompok Prenjak

dalam Pengelolaan eco edukasi wisata Tapak didominasi oleh penurunan hubungan kemitraan meskipun juga sering mengalami fluktuatif. Penurunan tersebut karena kurangnya komunikasi sehingga menimbulkan perasaan tidak percaya, tidak adanya perjanjian MoU, rendahnya sarana dan prasarana, serta tidak adanya perautan konflik. Faktor penghambat program eco edukasi wisata adalah tidak adanya dukungan pemerintah Kota Semarang dengan kepemilikan lahan Tugurejo yang telah dijual dan dalam program reklamasi dengan jangka waktu 40 tahun oleh investor (Hapsari, 2017: Vol 6 No. 2).

Keenam, Kahfi Dwi Septian (2016), melakukan kajian penelitian terhadap kemitraan terhadap penataan dan pemeliharaan taman di Kota Bogor. Penelitian ini berjudul : Kemitraan Pemerintah Kota Bogor dengan Swasta dalam Penataan dan Pemeliharaan Taman Tahun 2013-2016. Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: kemitraan pemerintah swasta dan taman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan gejala yang terjadi. Hasil kajian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pola kemitraan Pemerintah Kota Bogor dengan PT Pilar Hijau Madani dikatakan berhasil karena selama ini pendanaan hanya menggunakan APBD sehingga kemitraan ini sebagai solusi untuk penataan dan pemeliharaan taman. Selain itu, pekerjaan penataan dan pemeliharaan taman dinilai baik karena pekerjaannya yang cepat. Dengan adanya kemitraan ini, dapat meminimalisir resiko pemerintah sehingga pemerintah hanya melakukan

pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan. Pelaksanaan kemitraan ini membagi tugas dan kontribusi masing-masing yang seimbang sehingga semua pihak akan menerima keuntungannya (Kahfi, 2016: Vol 4 No. 4).

Ketujuh, Laras Ayu Andini (2014), melakukan kajian penelitian terhadap kemitraan terhadap pengembangan dan pengelolaan kawasan perkampungan Budaya Betawi. Penelitian ini berjudul : Pola Kemitraan dalam Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Perkampungan Budaya Betawi. Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: kemitraan, efektivitas jaringan dan lingkungan budaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan gejala yang terjadi. Hasil kajian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pola kemitraan dalam pengembangan dan pengelolaan Kawasan Perkampungan Budaya Betawi belum tercipta kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat yang kuat sehingga peran swasta bahkan hilang dalam jaringan pariwisata. Hal itu disebabkan karena regulasi yang belum memungkinkan swasta untuk bergabung dan adanya perbedaan konsep pengembangan kawasan budaya oleh pemerintah dan swasta. Adapun hambatan lain seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya komunikasi rutin pemerintah dan lembaga pengelola (Laras, 2014: Vol 3 No. 4).

Kedelapan, Yuliana Isnaningtyas (2017), melakukan kajian penelitian terhadap kemitraan terhadap pengelolaan desa wisata. Penelitian ini berjudul : Analisis Kemitraan dalam Pengelolaan Desa Wisata Kandri

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: kemitraan, pengelolaan dan desa wisata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan gejala yang terjadi. Hasil kajian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pola kemitraan dalam pengelolaan Desa Wisata Kandri masih mengalami beberapa hambatan salah satunya yaitu masih sulit merubah pola pikir yang tradisional sehingga menyebabkan minimnya stakeholder sehingga belum terjalin koordinasi yang baik antara pemerintah, pordakwis dan masyarakat (Yuliana, 2017: Vol 6 No. 3).

Kesembilan, Tatag Taufani Anwar (2016), melakukan kajian penelitian terhadap sengketa pengelolaan obyek wisata. Penelitian ini berjudul: Sengketa Tata Kelola Antar Instansi Pemerintah: Studi Kasus Pengelolaan Obyek Wisata Telaga Warna Dieng Tahun 2012-2015. Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: kemitraan, sengketa dan pengelolaan obyek wisata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan gejala yang terjadi. Hasil kajian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pola kemitraan dalam pengelolaan obyek wisata Telaga Warna Dieng antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan BKSDA Jawa Tengah tidak memenuhi prinsip kesetaraan dan kepercayaan. Alasannya karena ada perbedaan kedudukan, tingkatan, tugas dan fungsi instansi sehingga pembagian keuntungan tidak tumpang bahkan banyak pihak yang mengalami kerugian (Tatag, 2016: Vol 5 No. 3).

Kesepuluh, Sonny Setyo Nugroho (2015), melakukan kajian penelitian terhadap kemitraan terhadap pengelolaan pariwisata. Penelitian ini berjudul : Pola Kemitraan dalam Pengelolaan Pariwisata di Kepulauan Karimunjawa Kabupaten Jepara. Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: kemitraan dan pola hubungan stakeholder. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan gejala yang terjadi. Hasil kajian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pola kemitraan dalam pengelolaan pariwisata di Kepulauan Karimunjawa belum memberikan kontribusi yang cukup di dalam peningkatan pendapatan daerah. Hal tersebut dikarenakan peran stakeholder yang belum optimal, kurangnya koordinasi antar pemerintah, kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan, dan terbatasnya sumber daya manusia di lapangan (Sonny, 2015: Vol 4 No. 1).

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun Penelitian	Hasil Kajian	Metode
1.	Adi Sofyan Prasetya, 2013	Kerjasama antara Kabupaten Semarang dan Kota Semarang dalam pengelolaan air bersih menggunakan sistem bagi hasil.	Metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif-analitis
2.	Setiyo Utomo, 2017	Kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Eramaya memiliki kendala ketersediaan anggaran dan rendahnya kualitas sumber daya masyarakat.	Metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif-kualitatif
3.	Erna Kurnia, 2017	Kemitraan dalam memberdayakan petani ini menguntungkan berbagai pihak. Bagi masyarakat akan meningkatkan penghasilan. Bagi LSM akan meningkatkan nilai	Metode penelitian kualitatif

		<p>tambah pertanggungjawabannya.</p> <p>Dan bagi pemerintah yaitu membantu pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan.</p>	
4.	<p>Muhammad Faiz Ilham, 2016</p>	<p>Kerjasama antara Kabupaten Semarang dan Kota Semarang dalam pemanfaatan air bersih telah dilaksanakan pada tahun 2004 dan telah diresmikan tahun 2013 namun masih belum bekerja secara optimal.</p>	<p>Metode deskriptif kualitatif</p>
5.	<p>Frita Aprilia Hapsari, 2017</p>	<p>Kemitraan dalam pengelolaan eco edukasi wisata mengalami penurunan hubungan kemitraan karena kurangnya komunikasi sehingga menimbulkan perasaan tidak percaya, tidak adanya</p>	<p>Metode penelitian kualitatif</p>

		perjanjian MoU, rendahnya sarana dan prasarana, serta tidak adanya perautan konflik. Serta tidak adanya dukungan pemerintah kepemilikan lahan Tugurejo yang telah dijual dan dalam program reklamasi dengan jangka waktu 40 tahun oleh investor.	
6.	Kahfi Dwi Septian, 2016	Pola kemitraan Pemerintah Kota Bogor dengan PT Pilar Hijau Madani dikatakan berhasil karena pekerjaan penataan dan pemeliharaan taman dinilai baik karena pekerjaannya yang cepat. Dengan adanya kemitraan ini, sehingga pemerintah hanya melakukan pengawasan terhadap jalannya	Metode penelitian kualitatif

		<p>pelaksanaan. Pelaksanaan kemitraan ini membagi tugas dan kontribusi masing-masing yang seimbang sehingga semua pihak akan menerima keuntungannya</p>	
7.	Laras Ayu Andini, 2014	<p>Pola kemitraan dalam pengembangan dan pengelolaan Kawasan Perkampungan Budaya Betawi belum tercipta kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat yang kuat sehingga peran swasta bahkan hilang dalam jaringan pariwisata. Hal itu disebabkan karena regulasi yang belum memungkinkan swasta untuk bergabung dan adanya perbedaan konsep pengembangan kawasan budaya oleh pemerintah dan</p>	<p>Metode penelitian kualitatif</p>

		swasta, kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya komunikasi rutin pemerintah dan lembaga pengelola	
8.	Yuliana Isnaningtyas, 2017	Pola kemitraan dalam pengelolaan Desa Wisata Kandri masih mengalami beberapa hambatan salah satunya yaitu masih sulit merubah pola pikir yang tradisional sehingga menyebabkan minimnya stakeholder sehingga belum terjalin koordinasi yang baik antara pemerintah, pordakwis dan masyarakat.	Metode penelitian kualitatif
9.	Tatag Taufani Anwar, 2016	Pola kemitraan dalam pengelolaan obyek wisata Telaga Warna Dieng antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan BKSDA Jawa Tengah tidak	Metode penelitian kualitatif

		<p>memenuhi prinsip kesetaraan dan kepercayaan. Alasannya karena ada perbedaan kedudukan, tingkatan, tugas dan fungsi instansi sehingga pembagian keuntungan tidak tumpang bahkan banyak pihak yang mengalami kerugian</p>	
10.	<p>Sonny Setyo Nugroho, 2015</p>	<p>Pola kemitraan dalam pengelolaan pariwisata di Kepulauan Karimunjawa belum memberikan kontribusi yang cukup di dalam peningkatan pendapatan daerah. Hal tersebut dikarenakan peran stakeholder yang belum optimal, kurangnya koordinasi antar pemerintah, kurangnya pengawasan dalam</p>	<p>Metode penelitian kualitatif</p>

		pelaksanaan, dan terbatasnya sumber daya manusia di lapangan	
--	--	--	--

Berdasarkan hasil literatur penelitian terdahulu yang saya baca, relevansi penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu mengenai kemitraan yang dilakukan pemerintah dengan berbagai aktor yang bertujuan menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam pelaksanaan kemitraan tersebut. Selain itu relevansi penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya teliti membahas mengenai bagaimana proses kemitraan, kegagalan dan keberhasilan kemitraan, bentuk-bentuk kemitraan, syarat dibentuknya kemitraan dan adapula mengenai sengketa kemitraan.

1.5.2 Teori Kemitraan

1.5.2.1 Konsep Kemitraan

Kemitraan hampir sama dengan kerjasama yang mengutamakan kesetaraan, kebersamaan, kepedulian dan jaringan kerja yang menumbuhkembangkan kemanfaatan timbal balik antara pihak-pihak yang bermitra dalam menyelenggarakan pelayanan sosial dan juga pembangunan. Kemitraan (*partnership*) antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan di daerah memberikan manfaat dan dampak positif yang sangat besar. Manfaat positif dirasakan bagi pihak-pihak yang bermitra, terutama pihak swasta

dan masyarakat yaitu dapat mengurangi pengangguran karena dapat menciptakan dan memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, yang selanjutnya diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemitraan pembangunan akan menimbulkan dampak positif, yaitu menumbuhkembangkan peningkatan produksi dan produktivitas, peningkatan aliran investasi, kelancaran distribusi dan pemasaran, aksesibilitas dan mobilitas penduduk, peningkatan keterkaitan pembangunan ekonomi dan interaksi sosial antara daerah/wilayah. Keberhasilan kemitraan pembangunan berarti pula akan meringankan beban keuangan bagi pemerintah daerah (Adisasmita, 2011: 150-152). Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership* dan berasal dari kata *partner* yang berarti pasangan, jodoh, sekutu atau kompanyon. Sedangkan *partnership* berarti persekutuan atau perkongsian. Dapat disimpulkan bahwa kemitraan adalah suatu bentuk ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan kemampuan di suatu bidang tertentu, tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Tujuan dilakukannya kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik sehingga antar pihak-pihak yang bermitra saling memberikan keuntungan, bukan sebaliknya ada suatu pihak yang dirugikan atau merugikan pihak lain. Oleh karena itu, untuk menciptakan sebuah kemitraan yang saling menguntungkan dan bermanfaat maka perlu komitmen yang seimbang antara satu dengan

lainnya. Kemitraan dapat dilakukan oleh pihak-pihak baik perseorangan, kelompok-kelompok atau badan usaha. Adapun pihak-pihak yang bermitra dapat memiliki status yang setara atau subordinate, memiliki misi yang sama ataupun misi yang berbeda sehingga saling mengisi atau melengkapi secara fungsional (Sulistiyani, 2004: 129-130).

Kemitraan mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih berinteraksi secara dinamis untuk mencapai tujuan bersama. Terdapat tiga unsur pokok dalam kerangka kemitraan yaitu unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi, dan unsur tujuan bersama. Jika ada salah satu unsur tidak termuat dalam ketiga unsur maka tidak dapat dikatakan kemitraan. Unsur dua pihak atau lebih, menggambarkan suatu himpunan dari kepentingan-kepentingan yang satu dengan yang lain saling mempengaruhi sehingga interaksi diwujudkan untuk mencapai tujuan bersama. Unsur interaksi bersifat dinamis yang berarti kemitraan yang dilakukan akan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Sehingga kemitraan menempatkan pihak-pihak pada posisi yang seimbang, serasi dan selaras. Dapat dikatakan kemitraan apabila diperoleh manfaat bagi semua yang terlibat di dalamnya (*win win*). Dalam upaya mencapai keuntungan dan manfaat diperlukan komunikasi yang baik antara semua pihak dan pemahaman yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Kemitraan pemerintah daerah dengan LSM/masyarakat dikembangkan untuk membuka peluang usaha bagi masyarakat dan mendorong potensi sosial

ekonomi yang dimiliki masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Ramses dan Bakry, 2009: 305-320).

Terdapat beberapa macam azas-azas kemitraan (Ramses & Bakry, 2009: 306) antara lain:

1 Azas manfaat

Segala usaha dan kegiatan yang akan dicapai harus memiliki manfaat agar dapat dioptimalkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2 Azas usaha bersama

Segala usaha dan kegiatan adalah upaya untuk mencapai tujuan bersama yang dilakukan secara gotong royong serta dijiwai semangat kekeluargaan dan kebersamaan.

3 Azas keterbukaan

Suatu usaha dan kegiatan berlangsung berdasarkan prosedur, mekanisme dan ketentuan yang ada, terbukanya peluang untuk informasi serta proses dapat dipertanggung jawabkan.

4 Azas kesetaraan

Segala usaha dan kegiatan dalam kerjasama menempatkan pihak-pihak pemerintah daerah yang berinteraksi pada posisi yang seimbang, serasi dan selaras.

5 Azas kecepatan dan ketepatan

Segala usaha dan kegiatan dalam kerjasama hendaknya berlangsung sesuai dengan agenda yang telah disepakati, dan diselesaikan secara tepat waktu dan tepat sasaran.

Pembentukan model kemitraan yang baik maka perlu adanya rancangan kontribusi masing-masing aktor yaitu pemerintah dan masyarakat. Rancangan kontribusi peran ketiga aktor tersebut tampak pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Aktor Kemitraan

Aktor	Peran	Bentuk Output Peran	Fasilitasi
Pemerintah	<p>a. Formulasi dan penetapan <i>policy</i></p> <p>b. Implementasi, monitoring dan evaluasi</p> <p>c. Mediasi</p>	<p>a. Kebijakan: politik, umum, khusus / departemental/sektoral penganggaran, juknis dan juklak</p> <p>b. Penetapan indicator keberhasilan</p> <p>c. Peraturan hukum</p> <p>d. Penyelesaian sengketa.</p>	<p>Dana, jaminan alat, teknologi, network, sistem manajemen informasi, edukasi</p>
Masyarakat	<p>a. Partisipasi dalam formulasi implementasi</p> <p>b. Monitoring dan evaluasi</p>	<p>a. Saran, input, kritik, rekomendasi, keberatan, dukungan dalam formulasi kebijakan</p> <p>b. <i>Policy action</i></p> <p>c. Dana swadaya menjadi objek</p> <p>d. Partisipan / pelaku utama / subyek</p> <p>e. Menghidupkan fungsi</p>	<p>Tenaga terdidik, tenaga terlatih, setengah terdidik dan setengah terlatih</p>

		<i>social control</i>	
--	--	-----------------------	--

Sumber: Sulistiyani, 2004: 97-99

Berdasar pemetaan peran aktor kemitraaan di atas, peran pemerintah paling menonjol pada penentuan rambu-rambu dan aturan main sehingga pemerintah lebih banyak berperan pada pengambilan keputusan dan pendanaan. Mengingat peran pemerintah adalah berupa fasilitasi kebijakan, pendanaan yang berupa investasi publik (*public investment*), penyediaan sistem informasi yang baik dan program edukasi masyarakat yang tepat.

Untuk menjaga kualitas hasil, pemerintah sebaiknya juga menetapkan pola monitoring dan evaluasi yang jelas dan berkelanjutan. Program yang dilakukan oleh pemerintah pada periode sebelumnya hendaknya dipelihara dan dimonitor oleh pemerintah berikutnya sehingga tanggung renteng akan berjalan terus agar program pembangunan dapat memiliki umur panjang dan tidak hanya sesuai dengan umur proyek. Kesalahan yang seringkali dilakukan oleh pemerintah yaitu tidak memelihara dan memperhatikan pembangunan yang telah dijalankan karena mereka berfikir bahwa proyeknya telah selesai. Namun seharusnya transisi kepemimpinan tidak menjadi penghambat dalam mengagendakan pelimpahan tanggung renteng dan program-program yang telah dilakukan agar program tersebut tetap hidup dan memberi kemaslahatan yang semakin besar secara generatif. Dalam rangka memudahkan menjaga,

pemeliharaan hasil pembangunan dan tanggung jawab bermitra, pemerintah hendaknya menyusun dan menetapkan kriteria evaluasi pada setiap program pembangunan. Lalu kriteria tersebut dikonsultasikan atau didiskusikan kepada masyarakat yang memiliki kompetensi/profesi yang relevan.

Peran masyarakat diberikan dalam bentuk partisipasi baik pada level formulasi, implementasi, monitoring maupun evaluasi. Tinggi rendahnya partisipasi masyarakat diukur berdasarkan tingkat keberdayaan dan pemahaman masyarakat tersebut karena tidak semua masyarakat mampu memberikan input, saran, kritik pada level formulasi kebijakan. Dalam memberdayakan masyarakat agar mampu memberikan saran, ide, kritik dan lain-lain, pemerintah perlu memberikan fasilitasi sistem edukasi masyarakat dengan cara:

1. Memberikan ruang yang luas kepada masyarakat untuk menyampaikan saran, kritik, ide, rasa keberatan, permintaan dan sebagainya tanpa dibebani sanksi dan ancaman.
2. Memberikan informasi secara transparan dan aksesibel kepada masyarakat yang menyangkut semua aspek dalam pembangunan.
3. Keterlibatan masyarakat dalam formulasi kebijakan melihat profesionalisme, kompetensi di samping nilai kepentingan masyarakat terhadap program pemberdayaan.

Peran lain masyarakat yang dapat digali dan dikembangkan adalah pendanaan. Partisipasi di bidang pendanaan merupakan potensi internal

yang dimiliki masyarakat, dana tersebut lebih sering disebut swadaya masyarakat. Peran masyarakat yang sangat penting adalah pada pemeliharaan kontrol sosial dalam rangka pelestarian dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Pola baru untuk membangun bangsa dan negara yang baik adalah dengan model kemitraan dengan cara memberikan peran yang setara kepada tiga aktor pembangunan antara lain pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah sudah lebih transparan dan mengembangkan kepemimpinan yang partisipatif tanpa diskriminasi. Swasta hendaknya ikut berkontribusi dalam memberikan energi dan semangat untuk melaksanakan pemberdayaan bersama pemerintah dan masyarakat dalam mencapai pembangunan. Dan masyarakat hendaknya mampu memanfaatkan peluang untuk memberikan peran aktif melalui partisipasi yang koheren. Sesungguhnya sejak pemerintahan Orde Baru upaya meningkatkan kemampuan masyarakat sudah dilakukan namun tidak sepenuhnya memiliki kontribusi dalam pemberdayaan karena dalam pembentukan daya di dalam masyarakat sering dikaitkan dengan konteks penyelenggaran pembangunan nasional dan daerah melalui proses pendekatan terpusat. Pendekatan ini sering dinyatakan dalam bentuk pembangunan dari pemerintah oleh pemerintah untuk rakyat.

Makna pendekatan dari pemerintah oleh pemerintah untuk rakyat adalah:

1. Datangnya ide, rencana pembangunan dan sekaligus proses perencanaan dan penetapan keputusan berasal dari pemerintah tanpa melibatkan masyarakat.
2. Implementasi kebijakan pembangunan juga dilakukan hanya oleh pemerintah tanpa melibatkan aktor-aktor masyarakat seperti tokoh masyarakat, kaum profesional, para ahli di bidang tertentu, ormas-ormas sebagai figur masyarakat. Dapat disimpulkan masyarakat hanya merupakan sasaran atau objek pembangunan yang tidak mempunyai kekuatan dalam pembangunan kecuali menerima begitu saja apa yang diinginkan pemerintah.

Pendekatan pembangunan terpusat ini tidak mampu menghasilkan legitimasi keberdayaan masyarakat yang sesungguhnya, meskipun terdapat dampak positif bagi perekonomian yaitu secara agregat mengalami kebangkitan dan pertumbuhan namun hal itu hanyalah kemakmuran semu. Di balik kebangkitan dan pertumbuhan ekonomi ternyata tersimpan kerapuhan masyarakat dan menciptakan ketergantungan yang beruntun. Demikian disadarinya kelemahan dari pendekatan pembangunan terpusat, lalu digantikan oleh pendekatan kedua yaitu pembangunan dari pemerintah bersama rakyat, oleh pemerintah bersama rakyat untuk rakyat.

Makna pendekatan dari pemerintah bersama rakyat, oleh pemerintah bersama rakyat untuk rakyat:

1. Datangnya ide dan perencanaan dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat. Tetapi pada kenyataannya ide berupa input dan

masyarakat hanya dapat memberi ide berupa permintaan atau keinginan karena seringkali proses formal sudah dikendalikan oleh pusat.

2. Pelaksanaan kebijakan pembangunan dilakukan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Akan tetapi pengertian masyarakat disini bukan masyarakat secara luas. Disini masyarakat mulai ditempatkan pada posisi sebagai subjek pembangunan namun masih bersifat selektif sehingga masyarakat yang terlibat langsung sebagai pelaku utama sangatlah terbatas jumlahnya.
3. Pada hakikatnya masyarakat merupakan tujuan dari pembangunan tersebut sehingga masih ada intervensi dari pemerintah.

Pendekatan kedua ini sedikit banyak telah mencerminkan bentuk kemitraan antara pemerintah dan masyarakat akan tetapi kemitraan pada pendekatan ini masih timpang karena belum adanya unsur swasta di dalam kemitraan. Dengan demikian seolah tidak ada tanggung jawab sosial bagi kalangan pebisnis dan swasta. Pendekatan kedua dinilai belum efektif karena masih ada dominasi pemerintah sementara peran masyarakat hanya sebagai formalitas. Oleh karena ketidakefektifan pendekatan yang kedua maka muncullah pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan pembangunan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat dan didukung oleh pemerintah.

Makna pendekatan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat dan didukung oleh pemerintah:

1. Datangnya ide dan perencanaan pembangunan dilakukan oleh masyarakat dengan mempertimbangkan aspek-aspek lokal yang bersifat kasuistik. Disini pemerintah memberikan fasilitas konsultasi, informasi data, anggaran, dan tenaga ahli yang dibutuhkan masyarakat.
2. Dari ide dan perencanaan yang telah dibuat oleh masyarakat lalu masyarakat mengimplementasikan sendiri yang telah direncanakan dengan fasilitas yang diberikan pemerintah.
3. Kemanfaatan hasil pembangunan untuk masyarakat dan sekaligus manajemen hasil pembangunan juga dilakukan dalam sistem sosial masyarakat dimana mereka tinggal.

Pada pendekatan ketiga ini peran pemerintah yaitu menjadi fasilitator pembangunan terhadap jalannya proses pemberdayaan masyarakat dengan baik. Yang dimaksud fasilitas dapat berupa kebijakan publik, kebijakan umum, kebijakan sektoral/departemental, tenaga ahli, pendanaan, penyediaan teknologi dan tenaga terampil, dan lain-lain. Di samping peran pemerintah, hendaknya swasta juga dilibatkan dalam kemitraan ini, namun pada pendekatan ketiga ini bentuk kemitraan tetap membiarkan sektor swasta tidak memiliki tanggung jawab sosial. Sedangkan peran masyarakat pada umumnya disampaikan dalam bentuk partisipasi non mobilisasi (Sulistiyani, 2004: 93-99).

Kerjasama pemerintah daerah dengan LSM/Masyarakat sangat bermanfaat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bentuk-bentuk kemitraan merupakan hasil pemberian kewenangan pemerintah daerah

kepada swasta untuk melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan dalam komponen kegiatan pembiayaan, pembangunan, rehabilitasi, pengoperasian, pemeliharaan atau pengelolaan pelayanan publik melalui cara (Adisasmita, 2011: 152):

- a. Hak yang diberikan pemerintah daerah kepada swasta untuk membangun, memakai, memanfaatkan, melaksanakan suatu pekerjaan atau pengelolaan, yang berkaitan dengan kegiatan penyediaan pelayanan publik dalam suatu jangka waktu tertentu dan kemudian menyediakan jasa pelayanan pada masyarakat dengan tarif tertentu yang ditetapkan pemerintah daerah.
- b. Hak yang diberikan dalam memanfaatkan kekayaan milik daerah, dan badan usaha milik daerah (BUMD), baik dengan berdiri sendiri, bekerja sama atau berkaitan dengan lembaga-lembaga tersebut.
- c. Kegiatan dalam bentuk pola kerjasama kontrak jangka panjang dengan pemberian konsesi pekerjaan pada pihak swasta dan memungkinkan pelaksanaan melalui pembiayaan proyek dengan investasi besar dan jangka pengembalian yang panjang.

Konsep model kemitraan terdiri dari lima komponen utama yang saling terintegrasi (Saefuddin, 2003: 45), yaitu:

1. Pedoman jaringan (*network guidance*), yang terdiri dari empat faktor antara lain nilai-nilai pedoman (*guiding values*), kepemimpinan (*leadership*), *governance*, dan strategi (*strategy*).

2. Manajerial/pengelolaan sumber daya jaringan (*management of network resources*) yang mencakup sumber daya manusia (*human resources*), sumber daya keuangan (*financial resources*), sumber daya fisik (*physical resources*), dan sumber daya informasi (*information resources*).
3. Manajerial/pengelolaan aktivitas jaringan (*management of network activities*) yang terdiri dari empat unsur antara lain perencanaan operasional (*operational plans*), sistem pengendalian (*control system*), koordinasi dan struktur komunikasi (*coordination and communication structure*), dan proses kemajuan kerja (*work processes*).
4. Keterampilan manajerial dan kerjasama tim (*management skills and teamwork*).
5. Lingkungan jaringan kerjasama (*networking environment*).

Munculnya ide mengenai model-model kemitraan berasal dari fenomena biologis yang kemudian diangkat ke dalam organisme kemitraan. Namun ini merupakan suatu pendapat yang bersifat sporadik sehingga masih perlu dilakukan pendalaman maupun penyempurnaan lebih lanjut. Bertolak dari pemahaman akan dunia organisme baik yang bersel satu yang tidak kasat mata maupun hewan yang dapat terlihat maka kemitraan dibedakan menjadi (Sulistiyani, 2004: 130-132) sebagai berikut:

1. *Pseudo partnership*, atau kemitraan semu

Kemitraan semu adalah sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih namun sesungguhnya yang dilakukukan bukan

merupakan kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya. Yang unik dari kemitraan ini bahwa kedua belah pihak atau lebih saling merasa penting untuk melakukan kerjasama meskipun ada di antara pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami makna dari kemitraan, substansi yang diperjuangkan dan manfaat yang didapat dari kemitraan tersebut. Kemitraan ini terjadi pada pola pembangunan pada jaman orde baru dimana sering disosialisasikan melalui slogan “pembangunan dari dan oleh pemerintah untuk rakyat”. Rakyat berposisi sebagai mitra kerja pemerintah namun sesungguhnya rakyat tidak mengetahui makna atas semua itu meskipun mereka yakin bahwa itu sangat penting.

2. *Mutualism partnership*, atau kemitraan mutualistik

Kemitraan mutualistik diadopsi dari pola simbiosis mutualisme yang terjadi antara kerbau dan burung dalam kehidupan binatang. Kemitraan mutualistik adalah persekutuan dua pihak atau lebih yang saling menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih sehingga akan tercapai tujuan secara optimal. Karena saling menyadari akan pentingnya kemitraan, maka dua agen/sosialisasi atau lebih yang memiliki status sama ataupun berbeda dapat melakukan kerjasama dan memperoleh manfaat yang dihasilkan dari terjadinya kerjasama serta memudahkan masing-masing dalam mewujudkan visi dan misinya.

3. *Conjugation partnership*, atau kemitraan melalui peleburan dan pengembangan

Kemitraan konjugasi adalah kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan "*paramecium*". Dua *paramecium* melakukan konjugasi untuk mendapatkan kemampuan dan kemudian terpisah dan selanjutnya dilakukan pembelahan diri. Organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan di dalam mencapai tujuan dapat melakukan kemitraan model ini karena dua pihak atau lebih dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing.

Adapun model kemitraan lain yang dikembangkan berdasarkan asas kehidupan hubungan kerjasama antar organisasi mencakup:

1. *Subordinate union of partnership*

Subordinate union of partnership adalah kemitraan atas dasar penggabungan dua pihak atau lebih yang memiliki status, kemampuan atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain secara subordinatif. Sehingga hubungan yang tercipta tidak berada sejajar atau horizontal atau seimbang satu sama lain, tetapi berada pada hubungan vertikal yaitu atas-bawah, kuat-lemah. Hal tersebut mengakibatkan tidak ada sharing dan peran atau fungsi yang seimbang.

2. *Linear union of partnership*

Linear union of partnership adalah kemitraan melalui penggabungan pihak-pihak secara linear atau garis lurus. Sehingga pihak yang bergabung dalam kerjasama yaitu pihak yang memiliki kesamaan berupa tujuan, atau misi, besaran/volume usaha atau organisasi, status atau legalitas.

3. *Linear collaborative of partnership*

Linear collaborative of partnership adalah kemitraan dengan melalui kerjasama secara linear yaitu berada pada garis lurus dan tidak saling tersubordinasi. Namun kemitraan ini tidak membedakan besaran atau volume, status/legalitas, atau kekuatan para pihak yang bermitra. Fokus utamanya adalah visi-misi yang saling mengisi satu sama lain.

Menurut Ditjen P2L dan PM dalam Kuswidanti (2008: 22) ada beberapa indikator untuk mengetahui keberhasilan kemitraan sebagai berikut:

1. Input

Indikator:

- a. Pembentukan tim yang ditandai adanya kesepakatan bersama dalam kemitraan.
- b. Adanya sumber dana untuk kemitraan.
- c. Adanya dokumen perencanaan yang telah disepakati.

2. Proses

Indikator: Frekuensi dan kualitas pertemuan sesuai kebutuhan.

3. Ouput

Indikator: Jumlah kegiatan yang sesuai dengan peran masing-masing.

4. Outcome

Indikator: Adanya penurunan masalah.

Hasil atau manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dari adanya kemitraan (Hafsah: 2009):

1. Produktivitas

Produktivitas akan meningkatkan kualitas maupun kuantitas hasil kemitraan.

2. Efisiensi

Kemitraan dapat menghemat waktu dan tenaga dalam pelaksanaannya.

3. Jaminan kualitas, kuantitas dan kontinuitas

Kualitas, kuantitas dan kontinuitas sangat erat kaitannya dengan efisiensi dan produktivitas sebagai pendorong kemitraan.

4. Resiko

Kemitraan dapat mengurangi resiko sehingga semua pihak kemitraan dapat menanggung resiko

5. Ketahanan Sosial

Kemitraan sebagai bentuk upaya pemberdayaan.

1.5.2.2 Syarat Kemitraan

Kemitraan merupakan salah satu strategi pengembangan ekonomi daerah yang tepat, dalam arti terpercaya (*reliable*), dapat diterima secara luas (*acceptable*), dan dapat diimplementasikan (*implementable*). Konsep kemitraan sudah lama dikenal dan dilaksanakan masyarakat dalam bidang ekonomi dan sosial sehingga bukan merupakan hal yang asing dan baru dalam masyarakat. Dalam masyarakat modern (maju), konsep kemitraan merupakan kegiatan antara pihak-pihak yang bermitra harus ditampilkan sebagai konsep akademik yang dapat dipahami dan diterima secara luas, sehingga respons atau tanggapan masyarakat menjadi positif dan masyarakat dapat membuka diri, dan menjadi tidak asing saat menghadapinya. Syarat dasar kemitraan adalah adanya prinsip yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Konsep kemitraan antara pemerintah daerah dengan pihak swasta dikenal juga sebagai kebijakan swastanisasi atau privatisasi. Swastanisasi dan privatisasi ini mempunyai berbagai bentuk salah satunya adalah bentuk yang paling ekstrem yaitu perubahan kepemilikan dalam pemerintah daerah.

Syarat dalam membentuk kemitraan berdasar pengertian di atas sebagai berikut:

1. Ada dua pihak atau lebih
2. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan
3. Ada kesepakatan

4. Saling membutuhkan

Bidang pelayanan publik yang umumnya dikelola dengan prinsip kemitraan ini adalah pembangunan proyek infrastruktur, yang mencakup pembangunan proyek-proyek di bidang energi, tenaga listrik, jalan raya, pengelolaan sampah, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pelabuhan laut, pariwisata, pelabuhan udara, pengaliran, air minum, telekomunikasi, perkeretapian, sistem transportasi, reklamasi, kawasan industry, permukiman dan perkotaan, bangunan umum, fasilitas pasar, rumah potong, sistem informatika dan data, pergudangan, air limbah, drainase, pengerukan, pertambangan, dan kegiatan infrastruktur lainnya.

Beberapa faktor penting yang harus diperhatikan sebelum kemitraan dilaksanakan (Adisasmita, 2011: 152-154) adalah sebagai berikut:

1. Adanya kebutuhan atau permintaan yang tinggi atas jasa dari pelayanan publik yang akan dimitrakan. Analisis permintaan atas jasa infrastruktur mencakup:
 - a. Melakukan evaluasi dengan teliti untuk mengetahui apakah pelayanan publik yang ada benar-benar sudah tidak mampu lagi mendukung kenaikan permintaan akan jasa yang dihasilkan.
 - b. Adanya sifat monopoli (*minimal near-monopoli*) dalam penyediaan pelayanan publik. Dengan adanya sifat monopoli, maka *free rider* atas jasa yang akan dimitrakan menjadi minim.

2. Adanya desain teknis yang inovatif. Artinya desain teknis rinci yang ditawarkan harus sederhana mampu memecahkan permasalahan yang riil. Ketertarikan pemerintah akan kemitraan akan semakin tinggi bila desain teknisnya menggunakan *approach system*, yaitu mampu menyelaraskan pelayanan publik yang akan dibangun dengan pelayanan publik lain yang berhubungan.
3. Adanya proposal pembiayaan proyek yang menarik dilihat dari;
 - a. Biaya konstruksi yang rendah.
 - b. Tingkat rasio utang yang dapat diterima.
 - c. Tingkat tarif yang menarik, dan
 - d. Masa konstruksi dan konsesi yang pendek.
4. Proyek yang akan diusulkan merupakan kegiatan yang strategis kedudukannya untuk meningkatkan pembangunan pelayanan publik secara komprehensif dan juga terkait dalam pencapaian sasaran pembangunan secara sektoral.
5. Proyek yang diusulkan terkait dengan strategi pembangunan sektoral untuk dapat menyediakan tambahan pelayanan kepada masyarakat.
6. Hasil pelaksanaannya dapat bermanfaat dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
7. Adanya persiapan teknis yang lengkap yang menunjukkan lingkup pelaksanaan proyek yang diusulkan, termasuk rencana persiapan di lapangan dan adanya dukungan masyarakat dalam pelaksanaannya.

8. Terdapatnya dukungan analisis yang memberikan penjelasan mengenai risiko dan sensitivitas dari indikator finansial.
9. Terdapatnya kajian analisis mengenai dampak lingkungan dari proyek.
10. Terdapatnya kajian tentang pilihan bentuk kontrak-kontrak kerjasama yang dipersiapkan dan diusulkan.
11. Adanya kajian mengenai unsur risiko yang terkait dengan proyek dan usulan pembagian risiko-risiko diantara para mitra proyek yang adil dan wajar.

Jaringan kerjasama atau kemitraan merupakan hal yang sangat penting di era globalisasi ini untuk meningkatkan kemajuan pembangunan dan kesejahteraan sosial masyarakat itu sendiri. Dalam D.L. Plucknet, 1990 mengungkapkan jaringan kerjasama atau kemitraan merupakan hubungan antar individu atau kelembagaan dengan pendistribusian kerja untuk mencapai tujuan bersama yang diharapkan. Agar tercapai kerjasama yang bersifat sinergis maka pihak yang terlibat dalam kerjasama harus bersedia untuk membuka diri dan mengkomunikasikan format kerjasama yang diinginkan. Format kerjasama yang baik adalah membentuk tim kerja untuk melibatkan unsur pelaksana pembangunan dalam menyelesaikan masalah pembangunan daerah. Oleh karena itu kemitraan tidak dapat dilakukan dengan cara pihak mendelegasikan kepada pihak yang lain untuk melaksanakan, hal tersebut dapat menghasilkan kerjasama atau kemitraan yang kurang memuaskan.

Pola kerjasama yang sinergis dapat dilakukan bersama antar seluruh aktor dan stakeholder di daerah. Pada tahap perencanaan dilakukan kajian bersama yang membahas mengenai potensi, permasalahan, peluang dan tantangan yang dihadapi oleh daerah yang dilakukan secara terbuka dan transparan. Sehingga rumusan tahapan pelaksanaan pembangunan dapat dijabarkan dalam program pembangunan akan memiliki tujuan yang sangat spesifik dan sesuai dengan jenis, serta ruang lingkup program tersebut. Rumusan tersebut dapat dilakukan secara efektif untuk mencapai tujuan serta efisien dalam memanfaatkan segala sumber daya pembangunan. Untuk melakukan hubungan kerjasama yang sinergis dan komplementer perlu dilakukan kesepakatan atau perumusan pedoman jaringan kerjasama atau kemitraan. Pedoman tersebut merupakan prinsip dan ide dasar dan merupakan bagian dari budaya *networking* dan *partnership* dan digunakan selama pelaksanaan antara stakeholder dilakukan. Keberhasilan kerjasama didasarkan pada faktor kepemimpinan. Melalui kepemimpinan yang baik akan mampu menjalin visi misi kerjasama maka *networking* yang terjalin diharapkan mampu mencapai tujuan kedua belah pihak. Setiap daerah memiliki sektor unggulan dalam melaksanakan pembangunan yang didasarkan pada sumber daya. Faktor penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek akan membawa pengaruh positif untuk pembangunan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

Bentuk kerjasama dimulai dengan reorientasi paradigma untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas program melalui peningkatan jiwa kewirausahaan, manajemen, administrasi pembukuan, dan lain-lain oleh *Business Development Service*. Dengan demikian, hasil program bersifat tepat guna dan mudah dipahami agar sasaran dapat mengembangkannya. Keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dalam hal khususnya sumber daya manusia merupakan tantangan bagi stakeholder lain dalam mewujudkan pembangunan daerah. *Business Development Service* perlu membina lebih banyak masyarakat dalam mengkaji potensi mereka dengan target awal memberdayakan masyarakat melalui training untuk meningkatkan mengembangkan usaha secara mandiri. Kerjasama ini dapat dilakukan secara jangka panjang dan berkelanjutan. Aktivitas jaringan kerjasama dan kemitraan berdasarkan kelembagaan terdiri dari 3 tahapan antara lain perencanaan strategis (*strategic planning*), perencanaan operasional (*operational planning*), mekanisme pengawasan dan pengendalian (*monitoring and control*). Jaringan kerjasama/kemitraan dikatakan sukses apabila komponen pelaksana yang terlibat mampu merumuskan perencanaan dan mempersiapkan untuk jangka panjang dan berkelanjutan. Perencanaan tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan atau program secara operasional yang didukung dengan pengendalian dan pengawasan oleh UMKM, BDS (LSM, swasta, perguruan tinggi), mitra bisnis, lembaga keuangan dan sebagainya maupun forum control seperti pemerintah daerah dan BI. Proses tersebut akan berjalan baik jika

didukung kemampuan manajerial dan kerjasama tim yang baik. Dalam kerjasama perlu memperhatikan unsur lingkungan di dalam maupun di luar jaringan. Melalui revitalisasi, platform tersebut dapat dijadikan ajang pengintensifan proses dialog dan diskusi interaktif yang terarah sehingga mewujudkan jaringan kerjasama yang utuh (Saefuddin, 2003: 44-50).

1.5.2.3 Kemitraan sebagai Strategi Pemberdayaan

Good governance diciptakan agar dapat mendekatkan unsur pemerintah, swasta dan masyarakat. Pada dasarnya pemberdayaan dimaknai sebagai proses penyerahan kekuasaan dari pemerintah kepada pihak yang lemah (masyarakat miskin) sehingga dalam rangka menciptakan pembangunan yang merata maka pemerintah hendaknya menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada swasta dan pihak yang lemah atau kurang berdaya (masyarakat miskin) supaya mereka memiliki kekuatan untuk membangun, serta meningkatkan daya masyarakat sehingga memiliki kemampuan dan kemandirian untuk membangun. Masyarakat miskin memiliki ketidakberdayaan secara ekonomi, sosial, budaya dan politik. Secara ekonomi jelas masyarakat miskin berada di batas atau di bawah garis kemiskinan sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sangat minim. Aspek sosial tampak masyarakat memiliki banyak keterbatasan lingkungan sosial, baik untuk melakukan sosialisasi, interaksi secara vertikal ke atas bahkan masyarakat miskin sulit untuk membangun *network* ke luar dari lingkungannya. Secara kultural masyarakat miskin cenderung mendapat perlakuan yang tidak setara dan

dipandang *undergrade* dalam segmentasi dan struktur sosial, jelas sekali bahwa masih ada diskriminasi terhadap masyarakat miskin. Secara politis masyarakat miskin tidak memiliki kekuatan dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan, bahkan pembuatan kebijakan cenderung seringkali mengintervensi masyarakat miskin. Dapat disimpulkan masyarakat miskin tidak memiliki cukup akses terhadap banyak aspek. Dengan keadaan yang seperti itu, perlu diciptakan pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk reformasi dari kapitalis birokrasi yang mencerminkan sikap pemerintah dan swasta ingin menguasai asset pembangunan secara sepihak karena pihak-pihak tersebut berkolaborasi hanya untuk mencari keuntungan personal atau sekelompok orang tanpa menghiraukan penderitaan yang dialami kaum lemah (Sulistiyani, 2004: 93-96).

Proses pemberdayaan adalah suatu siklus atau proses yang melibatkan masyarakat untuk bekerjasama dalam kelompok formal maupun nonformal untuk melakukan kajian masalah, merencanakan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi terhadap program yang telah direncanakan bersama. Proses pemberdayaan diukur melalui (a) kualitas dan kuantitas keterlibatan masyarakat mulai dari kegiatan kajian dan analisis masalah, (b) perencanaan program, (c) pelaksanaan program, serta (d) keterlibatan dalam evaluasi secara berkelanjutan. Keberdayaan masyarakat adalah dimilikinya daya, kekuatan atau kemampuan oleh masyarakat untuk mengidentifikasi potensi dan masalah serta dapat menentukan alternative pemecahannya secara mandiri. Keberdayaan

masyarakat diukur melalui tiga aspek (a) kemampuan dalam pengambilan keputusan, (b) kemandirian dan (c) kemampuan memanfaatkan usaha untuk masa depan (Wijayanti, 2011:15-17).

Schumacher memiliki pandangan “pemberdayaan sebagai suatu bagian dari masyarakat miskin dengan tidak harus menghilangkan ketimpangan struktural lebih dahulu”. Masyarakat miskin sesungguhnya memiliki daya untuk membangun namun mereka tidak sadar dengan adanya daya yang dimiliki, dengan demikian “memberikan kail lebih tepat daripada memberikan ikan”. Konsep pemberdayaan ini seiring dengan konsep *good governance* yang mengetengahkan tiga pilar yang harus ada dalam proses pemberdayaan masyarakat antara lain pemerintah, swasta dan masyarakat yang hendaknya menjalin hubungan kemitraan yang selaras. Selain ketiga pilar tersebut, ada pula NGO merupakan agen mendapat peran paling penting karena dipandang lebih *entrepreneur*, berpengalaman, dan inovatif dibanding dengan pemerintah. Perbedaan hakikat pemberdayaan melahirkan dua sudut pandang yang bersifat kontradiktif pula. Pendekatan yang pertama memahami pemberdayaan sebagai suatu sudut pandang konfliktual. Sudut pandang ini didasarkan pada persepektif konflik antara pihak yang memiliki daya/kekuatan/kemampuan di satu sisi, yang berhadapan dengan pihak yang lemah atau kurang memiliki daya/kekuatan/kemampuan di sisi lain. Pandangan ini sebagai suatu fenomena kompetisi untuk mendapatkan daya antara pihak yang kuat berhadapan dengan pihak yang lemah. Sehingga

proses pemberian daya kepada pihak lemah berakibat pada berkurangnya daya pada pihak lain. Sudut pandang ini lebih populer dengan istilah zero-sum. Sejalan dengan pendapat Sumodiningrat bahwa jika diinterpretasikan pendekatan zero sum tampaknya lebih mencerminkan pemberdayaan model barat. Pendekatan ini lebih sesuai untuk menganalisis pemberdayaan dalam pengertian pengalihan kekuasaan. Dalam konteks pengalihan kekuasaan berarti pengalihan atau pemberian kekuasaan dari pihak yang memiliki kekuasaan kepada pihak yang tidak memiliki kekuasaan, maka akan berkurangnya kekuasaan yang dimiliki oleh pihak pertama karena sebagian telah beralih pada pihak kedua. Tetapi pendekatan zero-sum menjadi kurang relevan karena pengalihan kekuasaan tidak berarti kemampuan akan berkurang ketika memberikan atau lebih tepatnya mentransfer kemampuan mereka kepada pihak yang belum memiliki kemampuan. Akibatnya penguasa menjadi enggan untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Pandangan kedua bertentangan dengan pandangan pertama. Manakala terjadi proses pemberdayaan dari pihak yang berkuasa/berdaya kepada pihak yang lemah justru akan memperkuat pihak yang memberi daya. Pemberi daya akan memperoleh manfaat positif berupa peningkatan daya apabila melakukan proses pemberdayaan terhadap pihak yang lemah. Sudut pandang ini disebut dengan *positive-sum* dengan penekanan aspek generatif. Sudut pandang ini dapat memfasilitasi terjadinya proses pemberdayaan yang hakiki, dengan adanya itikad baik untuk mengubah dan memperbaiki

keadaan menjadi lebih baik, yang belum memiliki daya menjadi berdaya. Proses pemberdayaan dilakukan tanpa ada rasa takut berkurangnya kekuasaan, karena proses pemberdayaan bermodal suatu dorongan kesadaran akan kewajiban akan pentingnya aspek generatif yang perlu dilangsungkan. Kekuatan dan keberdayaan yang tumbuh dalam masyarakat memberikan kontribusi yang baik kepada pemerintah dan negara karena masyarakat akan menjadi penyeimbang dalam membentuk kemitraan yang lebih bermakna (Sulistiyani, 2004: 90).

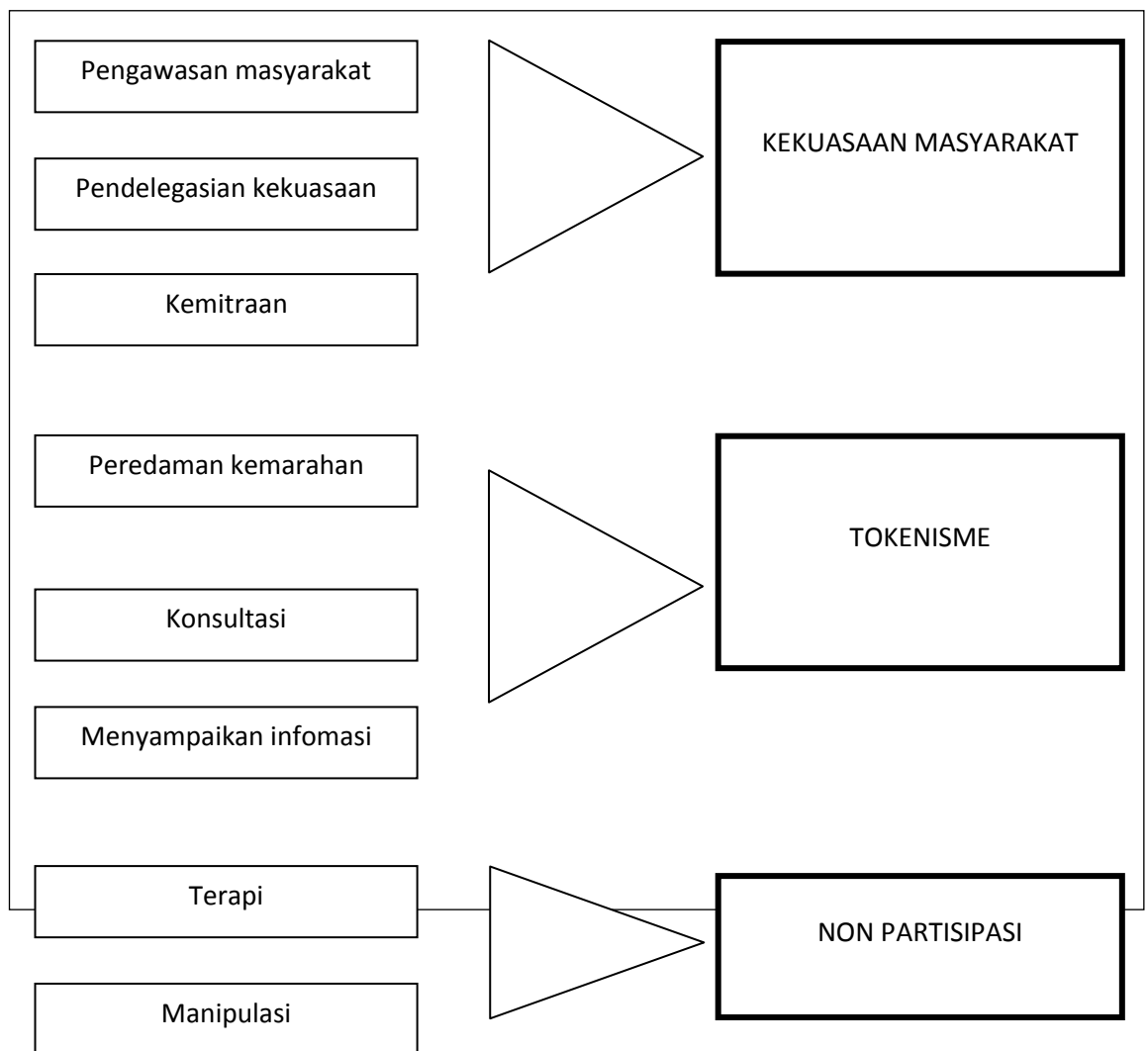
Falsafah dari pemberdayaan adalah bekerjasama dengan masyarakat untuk membantu mereka agar dapat meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Sehingga pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara kontinyu, maksudnya pemberdayaan merupakan upaya perubahan perilaku yang tidak bisa dilakukan seperti membalikkan telapak tangan. Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang memiliki tahapan yang jelas dan dibutuhkan waktu untuk melalui setiap proses. Sehingga pemberdayaan harus dilakukan secara bertahap, berkesinambungan dan dilakukan secara terus menerus. Oleh karena itu pemberdayaan perlu adanya kesabaran dan ketelatenan dari agen pemberdayaan dalam membimbing atau memfasilitasi proses perubahan tersebut (Anwas, 2013: 48-53).

Selama beberapa dekade berlalu sejarah perjalanan pembangunan di Indonesia dilakukan oleh pemerintah secara *single fighter* tanpa adanya

campur tangan dari rakyat untuk sekedar menyampaikan pendapat dan bahkan tidak diberi kesempatan untuk mengelola sendiri pembangunan tersebut, rakyat hanya sebagai penerima hasil pembangunan yang harus mau diintervensi. Untuk menghindari kegagalan dalam proses pembangunan pada tingkat *grass root* seperti pengalaman terdahulu, maka muncullah ide kemitraan. Dalam membangun kemitraan hendaknya memperhatikan aspek kemampuan antara pihak-pihak kemitraan. Eade (1997) Kemitraan yang tidak di desain dengan dengan jelas justru akan memunculkan ketimpangan dan ketergantungan. Oleh karena itu, pemberdayaan seharusnya berjalan seiring dengan kemitraan. Dalam membangun legitimasi kekuasaan masyarakat adapula tahapannya (1) Dari pemerintah, oleh pemerintah untuk rakyat. (2) Dari pemerintah bersama rakyat untuk rakyat. (3) Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat.

Berdasarkan tahapan tersebut, gradasi antara peran serta masyarakat, peran dan fungsi pemerintah serta peran agen akan bergerak sesuai dengan pola kekuasaan dominan dan peran dominan. Pada tahap pertama didominasi oleh pemerintah tanpa campur tangan *stakeholders* ataupun pihak non pemerintah. Inilah yang disebut teori non partisipasi Arnstein (1969). Tahap kedua mulai ada ruang untuk masyarakat namun hanya sebatas pelaksana pembangunan dan belum ada penyaluran ide. Arnstein menyebutnya sebagai tokenisme. Dan pada tahap ketiga adalah dominan masyarakat, kemitraan ini dilakukan dengan memberikan kekuasaan kepada rakyat. Istilah dari Arnstein yaitu merupakan

manifestasi dari tangga 6,7,8 antara lain kemitraan, pendelegasian kekuasaan dan pengawasan masyarakat, sebagaimana tampak pada gambar berikut.



Sumber; Arnstein, 1969 dalam Sulistiyani, 2004

- a. Tangga pertama yaitu manipulasi dan tangga kedua yaitu terapi (perbaikan) namun tidak termasuk dalam konteks partisipasi.

Alasannya karena pada tangga pertama dan kedua keterlibatan masyarakat dalam suatu program tidak dilandasi oleh dorongan mental, psikologis dan konsekuensi yang semuanya itu tidak akan memberikan kontribusi dalam program. Semua program telah dirancang dan diimplementasikan oleh pemerintah sehingga masyarakat hanya sebagai obyek penerimaan. Pemerintah hanya menginginkan dukungan publik semata. Arnstein menyebut sebagai ketidakpedulian.

- b. Tangga ketiga adalah penyampaian informasi, tangga keempat adalah konsultasi dan tangga kelima adalah penentruman. Pada tahap ini merupakan tahap untuk menampung ide, saran, masukan dan untuk meredam keresahan. Ketiga tangga ini disebut dengan tokenisme. Penyampaian informasi hanya suatu bentuk pendekatan kepada masyarakat agar memperoleh legitimasi publik atas program yang dicanangkan pemerintah dan tidak ada diskusi yang terjadi. Konsultasi dilakukan semata-mata hanya untuk memperkuat legitimasi publik, bukan untuk memperoleh pertimbangan dari masyarakat. Yang terakhir adalah peredaman. Ketiga tangga ini hanya merupakan sebuah formalitas pemerintah untuk mendapat legitimasi dari publik.
- c. Tangga ke enam adalah kemitraan dengan masyarakat. Tangga ke tujuh merupakan pelimpahan kewenangan, dan yang terakhir tangga ke delapan masyarakat telah mampu melakukan kontrol. Ketiga tangga ini termasuk dalam kategori tingkat kekuasaan masyarakat.

Berdasarkan taksonomi dari Arnstein, maka sebuah kemitraan untuk pemberdayaan masyarakat hendaknya sampai menyentuh tangga 6, 7, 8. Artinya jika ingin benar-benar mewujudkan masyarakat menjadi mitra pemerintah, maka pemerintah harus memposisikan diri bukan sebagai dinamisator melainkan menjadi fasilitator. Dan seiring berjalannya waktu, akan terjadi pendelegasian kewenangan dan terbentuk kemampuan kontrol oleh masyarakat, yaitu pada tangga ke tujuh dan ke delapan (Sulistiyani, 2004: 123-126).

1.5.2.4 Kritik Kemitraan

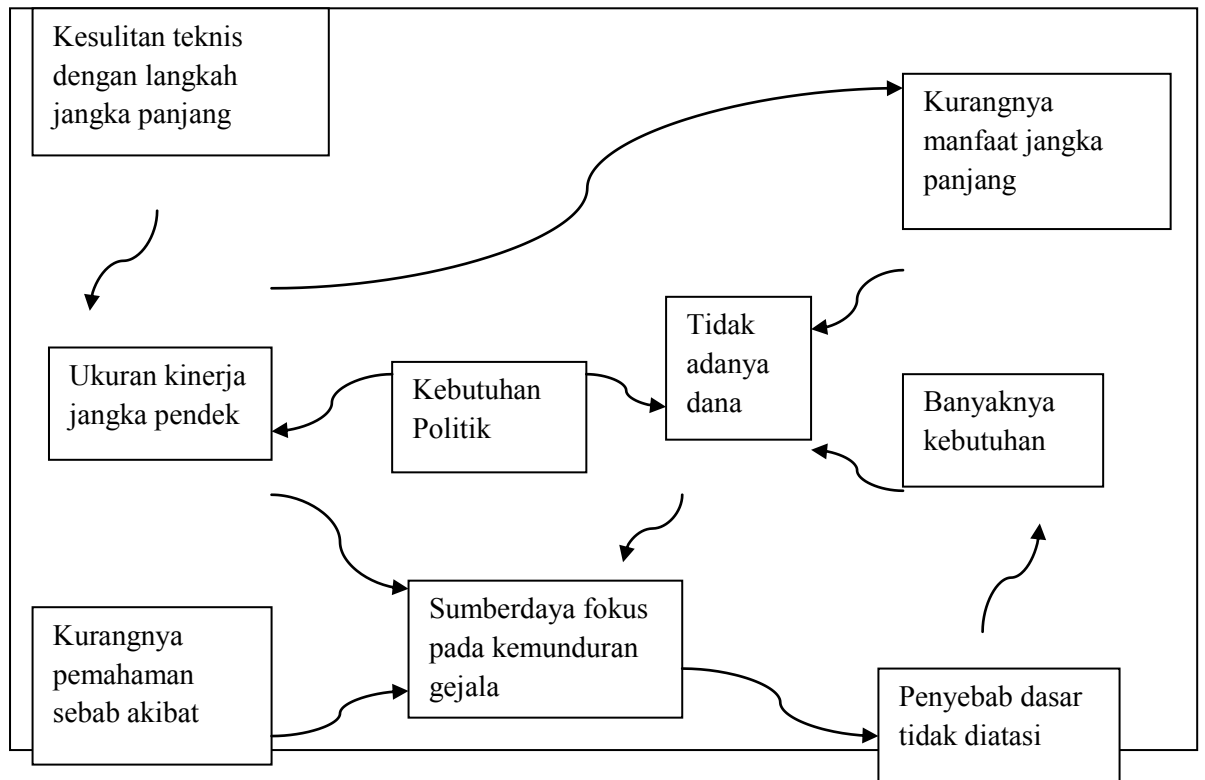
Salah satu ilmuwan, Whitehall memberi tugas kepada beberapa peserta untuk melakukan studi evaluasi terhadap bagaimana kemitraan dibuat agar lebih efektif. Pendekatan yang digunakan pada penelitian (Stewart, Goss et al., 1999; Richards et al., 1999; M. Stewart. 2000) berbeda-beda namun hasilnya pun konsisten yaitu disimpulkan bahwa kerjasama kemitraan sebagai hal yang positif dan bahkan penting. Namun masih sulit di dalam tantangan dan rintangan untuk melakukan kemajuan, ada beberapa hal yang dapat membantu kesulitan tersebut seperti: pendapatan, inovasi di tingkat lokal, investasi, perubahan budaya dan sebagainya. Kerja dari kemitraan akan mengalami peningkatan apabila pihak-pihak yang bermitra terlibat langsung dalam pelaksanaan kemitraan. Dibutuhkan waktu yang lama dalam melaksanakan kemitraan hingga mencapai tujuan bersama dan hasil yang maksimal antara lain proses

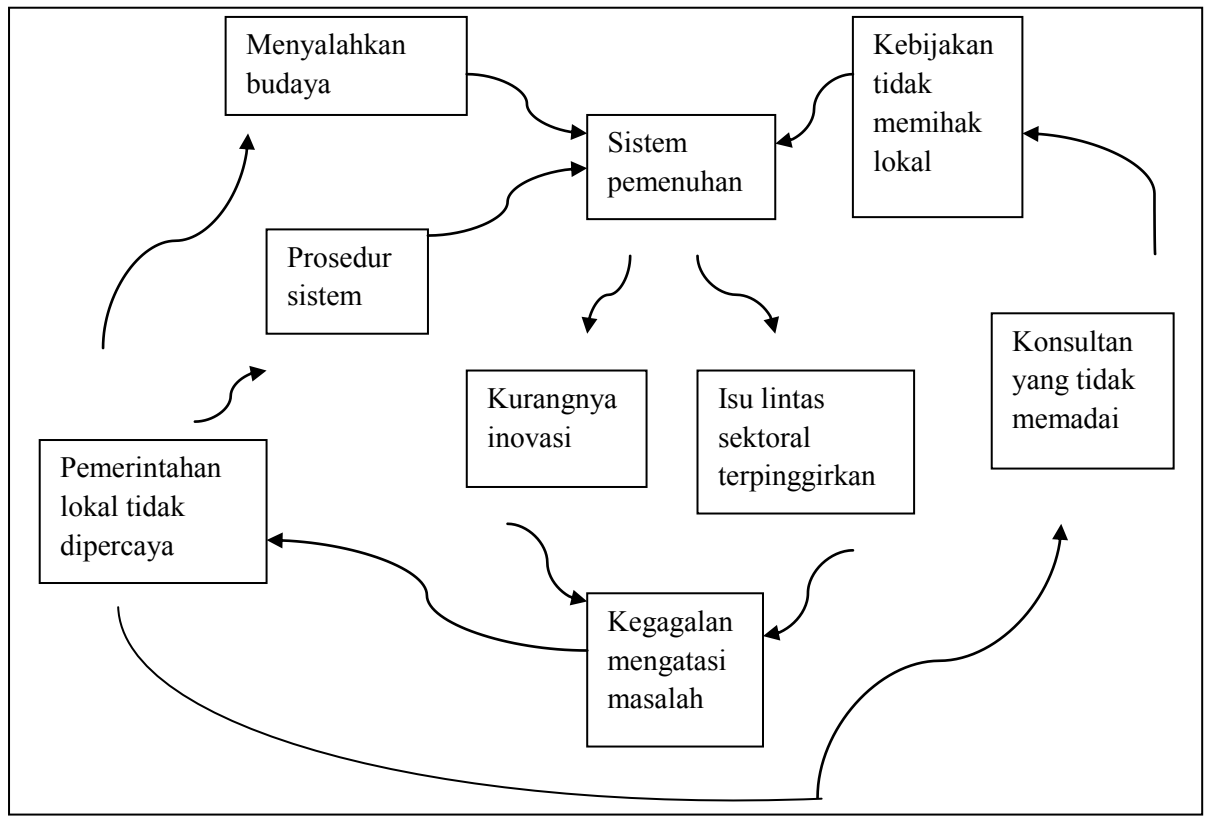
untuk pengenalan, berbagi data, identifikasi masalah, sumber daya dan perencanaan.

Kemitraan seringkali gagal dalam memberikan pelayanan atau mengalokasikan kembali sumber daya. Kemitraan yang berhasil dapat mengelola dengan baik, mengembangkan strategi lokal dan menawarkan sumber daya yang sesuai dengan strategi sehingga ada timbal balik antara pihak yang bermitra. Beberapa pihak telah menyiapkan unit penawaran untuk membuat proses lebih efisien dan mengutamakan pengetahuan. Namun tetap ada biaya di semua tingkat misal biaya kepatuhan sistem, pemantauan dan pelaporan untuk proyek lokal, dan dana tahunan yang semua biaya tersebut akan mengancam kelangsungan proyek. Penawaran tersebut dapat memecah belah hubungan lokal dan mendorong persaingan antar masyarakat; dan dana yang terfragmentasi tersebut akan membuat semuanya berjalan lancar.

Kemitraan seringkali sangat instrumental. Tujuan utamanya adalah mengajukan penawaran dana atau mencocokkan persyaratan pemerintah, atau untuk memenangkan kompetisi untuk mendapatkan dana tambahan. Pemimpin di lembaga publik seringkali mencari sumber baru untuk mendanai layanan dan mereka seringkali mencoba menyusun skema dan kesepakatan, otoritas kepemimpinan dan kemampuan membentuk kemitraan tidak berpengaruh dalam pencarian penawaran dana tambahan. Dengan hubungan baik akan mempermudah pengajuan penawaran dana, sedangkan organisasi yang sering mengalami konflik akan sulit untuk

memperoleh kepercayaan organisasi lain. Seringkali aktor organisasi tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam organisasi mereka sehingga mereka tidak dapat menjanjikan apapun atas nama organisasi tersebut dan memastikan tatanan yang ada di dalam organisasi tersebut, hal tersebut yang menyebabkan meningkatnya kegagalan kemitraan. Dua contoh loop belakang umpan balik yang diberikan umpan balik adalah pada gambar.





Sumber: Goss, 2001: 94-99

Banyak yang bisa dilakukan untuk memperkuat kemitraan dan untuk mengatasi masalah di atas. Ada banyak studi, mulai dari penelitian, dari kumpulan panduan praktik dan pengalaman tentang langkah-langkah praktis yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi di tingkat lokal.

- a. Pertama, organisasi mitra dapat bekerja sama untuk mengeksplorasi dan menyetujui tujuan kerja l. Tanpa tujuan bersama yang jelas, tindakan tidak akan mengikutinya. Sehingga harus ada negosiasi di tingkat lokal. Tanpa kerja keras untuk menentukan masalah dan

mendefinisikan konsep dengan cara yang memahami situasi lokal, tujuan cenderung tetap terlalu bias untuk ditindaklanjuti.

- b. Kedua, organisasi mitra perlu berbagi pemahaman tentang kemitraan- apakah tujuannya untuk pertukaran informasi, untuk perencanaan strategis, atau untuk proses penyampaian sistem penyatuan sumber daya yang lebih luas, dan sebagainya. Model yang dikembangkan oleh Kings Fund membedakan antara persaingan, kemitraan, koordinasi dan perilaku koevolusi yang dibutuhkan pada saat situasi yang berbeda. Antara model-model tersebut memiliki desain dan persyaratan desain sistem yang berbeda pula. Jaringan yang hanya merupakan gagasan atau pertukaran informasi tidak membawa persyaratan untuk tujuan bersama atau rencana tindakan, namun memerlukan sistem bersama untuk bertukar informasi, dan beberapa peraturan jaringan. Kemitraan sebuah bentuk yang memerlukan kerja untuk mendefinisikan peran, harapan, tanggung jawab dan cara untuk memperbaiki keadaan. Sebuah organisasi virtual akan memerlukan perhatian pada desainnya, kesepakatan tentang pengaturan manajemen, manajemen proyek, arus dan sistem sumber daya.
- c. Ketiga, perlu pengembangan strategi bersama yang tepat di dalam organisasi. Inisiatif pemerintah yang kompleks hanya harus diperlakukan sebagai konteks operasi, dan organisasi lokal harus memilih masalah lokal yang paling sulit sehingga akan menjadi tindakan kritis penting yang akan mencapai banyak sasaran secara

bersamaan. Kemitraan dapat mencari sinergi dan mengidentifikasi beberapa cara penting dimana sumber daya dapat digunakan secara berbeda. Harus ada harapan yang realistis bahwa semua tindakan yang direncanakan akan diambil, dan itu cukup untuk mencapai tujuan bersama.

- d. Keempat, penting untuk mengklarifikasi peran, harapan dan tanggung jawab untuk semua aktor. Akan ada perbedaan sesuai pada jenis kerja, tidak semua aktor memainkan peran yang sama dalam kemitraan. Kemitraan harus memenuhi harapan minimum semua mitra, walaupun mungkin tidak dapat memenuhi harapan orang-orang yang paling ambisius.
- e. Kelima, mitra perlu bekerja untuk menciptakan budaya untuk mencapai keberhasilan. Ini termasuk saling berbagi pemahaman tentang masalah dan prioritas masing-masing, menghargai keragaman perspektif dan keahlian yang berbeda, dan menemukan proses yang dapat membangun solusi.
- f. Keenam, mitra harus menciptakan sistem pengiriman bersama yang sesuai. Jika kemitraan akan mengambil tindakan, mereka perlu merancang struktur pengambilan keputusan yang mendelegasikan wewenang untuk bertindak untuk melaksanakan keputusan tersebut dan menetapkan batasan. Ada kebutuhan untuk menghubungkan sistem pengiriman layanan, kemitraan juga membutuhkan sistem

berbagi informasi (menggunakan email, internet, database bersama, konferensi video) untuk mengembangkan sistem manajemen risiko.

- g. Terakhir, kemitraan harus memiliki gagasan yang jelas tentang kesuksesan seperti apa, dan bukti yang mengindikasikan masalah atau kegagalan. menyetujui seperangkat kriteria dan sebuah proses untuk refleksi dan review akan menawarkan cara untuk menempatkan kemitraan apabila ada yang tidak sesuai (Goss, 2001: 94-99).

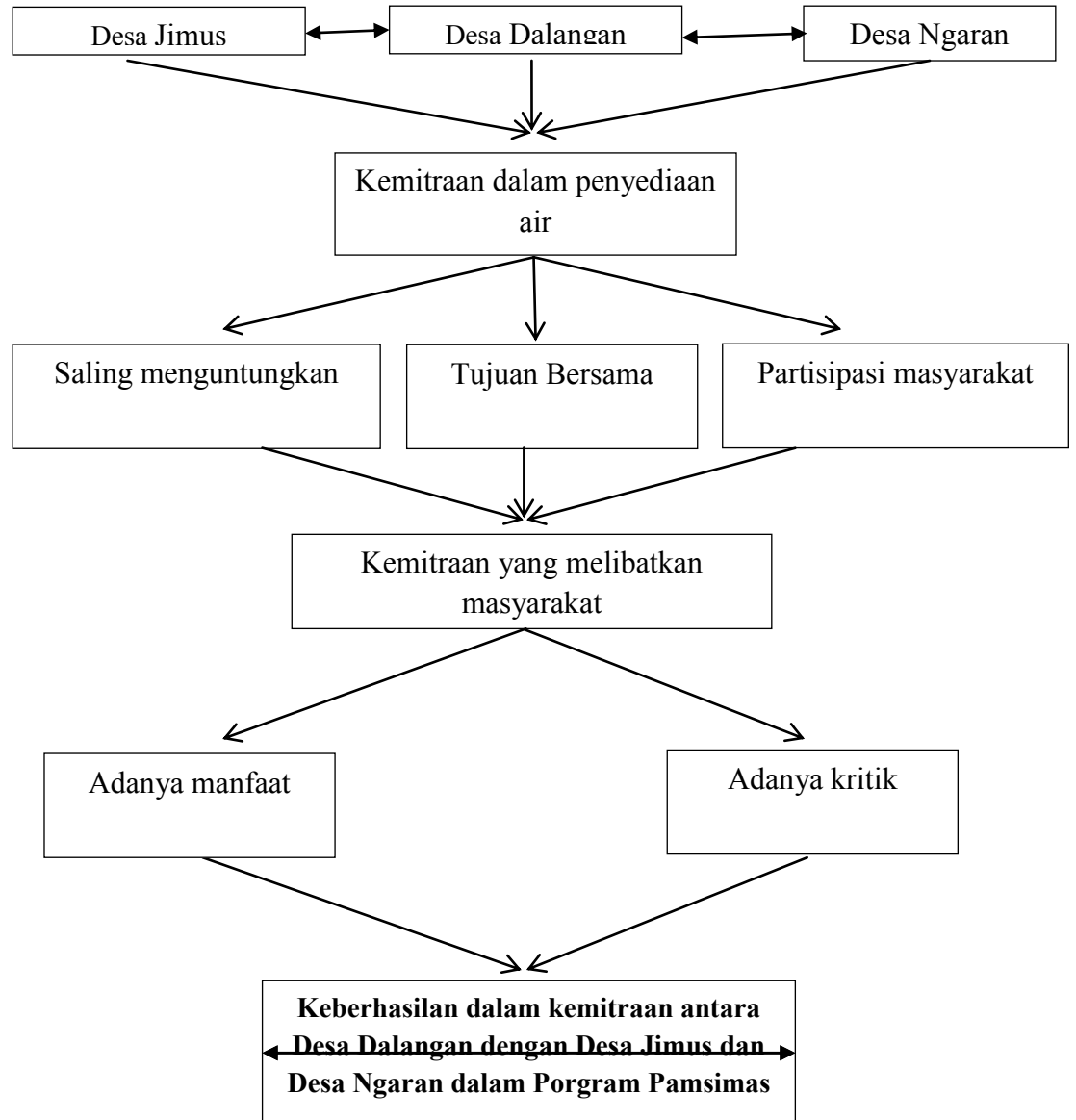
1.5.3 Kesimpulan Teori

Kemitraan merupakan suatu bentuk kegiatan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang memiliki rasa kesetaraan, kebersamaan, kepedulian dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kemampuan, kapasitas dan kapabilitas pada suatu bidang tertentu untuk dapat mencapai tujuan bersama sehingga dapat memperoleh manfaat dan hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Terdapat tiga unsur pokok dalam membangun kemitraan yaitu, pertama, unsur dua pihak atau lebih yang menggambarkan suatu himpunan yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan membentuk suatu kegiatan yang terdiri dari dua orang atau lebih. Kedua, unsur interaksi yang bersifat dinamis menggambarkan adanya kemitraan merupakan sebuah interaksi yang saling menguntungkan dan bermanfaat antara pihak-pihak yang bermitra. Ketiga, unsur tujuan bersama yang menggambarkan adanya tujuan bersama yang akan dicapai dari proses kemitraan yang akan dilaksanakan.

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan pada pelaksanaan program pembangunan khususnya pembangunan kesejahteraan sosial di daerah perlu adanya kemitraan antara pemerintah, swasta dan LSM/masyarakat untuk membuka peluang usaha bagi masyarakat dan mendorong potensi-potensi yang dimiliki masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Lingkup bidang dalam meningkatkan pembangunan kesejahteraan sosial antara lain sektor pembangunan (sub sektor perkebunan, pertanian, pangan, perikanan, peternakan, dan kehutanan), sektor sarana dan prasarana (irigasi, listrik, jalan, air bersih dan sebagainya), sektor perhubungan (darat, laut, udara), sektor pertambangan, sektor produksi, sektor kesehatan, sektor pendidikan dan lain-lain. Pelaksanaan kemitraan harus memperhatikan berbagai hal diantaranya adanya kebutuhan atau permintaan yang tinggi dari masyarakat, adanya proposal yang diajukan oleh masyarakat, adanya desain yang inovatif, pengajuan proposal yang akan menghasilkan pelaksanaan yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi dari masyarakat sehingga akan memperoleh manfaat dari adanya kemitraan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mempertimbangkan dampak lingkungan dan resiko-resiko yang akan ditimbulkan dari adanya proyek kemitraan tersebut. Agar pemberdayaan masyarakat dapat mewujudkan kemitraan dalam hal pelayanan publik maka diperlukan kontribusi dari masing-masing aktor yaitu pemerintah dan masyarakat. Peran pemerintah yaitu menetapkan kebijakan baik itu kebijakan publik, kebijakan umum

maupun kebijakan sektoral, menyediakan tenaga ahli, pendanaan dan teknologi serta melakukan monitoring evaluasi dan implementasi. Sedangkan peran masyarakat yaitu berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kemitraan yang sudah direncanakan dalam meningkatkan pelayanan publik sehingga masyarakat akan lebih berdaya dan mandiri. Kemitraan akan tercipta dengan baik apabila mengarah kepada asas-asas kemitraan antara lain asas manfaat, asas usaha bersama, asas keterbukaan, asas kesetaraan, dan asas kecepatan dan ketepatan. Kemitraan juga seringkali menjadi strategi dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Alasannya, masih banyak pembangunan di Indonesia yang belum menyentuh sampai ke bagian yang terkecil misalnya masyarakat pedesaan yang miskin. Sehingga dibutuhkan kemitraan antara agen-agen dari pemerintah ataupun non pemerintah untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat karena letaknya pun yang sangat dekat dengan masyarakat. Kemitraan itupun juga tidak semata-mata menghasilkan manfaat atau keuntungan saja namun seringkali mengalami gagal dalam memberikan pelayanan atau mengalokasikan kembali sumber daya tersebut yang akibatnya sebagian masyarakat tidak merasakan dampak dari kemitraan tersebut.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis



1.7 Definisi Konsep

Adanya Program Pamsimas yang bertujuan untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi masyarakat Indonesia khususnya di daerah pedesaan merupakan awal dilakukannya kemitraan antara Desa Dalangan dengan Desa Jimus dan Desa Ngaran dalam penyediaan air. Kemitraan tersebut dapat berjalan baik karena dorongan oleh beberapa faktor antara lain adanya tujuan bersama untuk mencapai keuntungan yang juga didukung keterlibatan dari masyarakat dalam implementasi kemitraan sehingga kemitraan tersebut akan saling menguntungkan semua aktor. Karena melibatkan masyarakat maka kemitraan dapat disebut juga kemitraan sebagai strategi untuk memberdayakan masyarakat. Dalam kemitraan yang memberdayakan masyarakat pun tidak hanya mencapai hasil yang memuaskan namun ada pula hasil yang berupa kritikan atau kekurangan. Beberapa faktor di atas merupakan faktor yang mendukung keberhasilan dalam kemitraan antara Desa Dalangan dengan Desa Jimus dan Desa Ngaran.

1.8 Definisi Operasional

Untuk menjaga kualitas hasil kemitraan sebaiknya juga menetapkan pola monitoring dan evaluasi yang jelas dan berkelanjutan. Tujuannya agar program sebelumnya harus terus dipelihara dan dimonitor supaya program selanjutnya dapat terus berjalan. Sehingga dalam rangka menjaga dan memelihara hasil program dan tanggung jawab bermitra hendaknya menetapkan kriteria evaluasi yang melibatkan masyarakat.

Sedangkan menurut Ditjen P2L dan PM dalam Kuswidanti (2008: 22) ada beberapa indikator untuk mengetahui keberhasilan kemitraan sebagai berikut:

1. Input

Indikator:

- d. Pembentukan tim yang ditandai adanya kesepakatan bersama dalam kemitraan.
- e. Adanya sumber dana untuk kemitraan.
- f. Adanya dokumen perencanaan yang telah disepakati.

2. Proses

Indikator: Frekuensi dan kualitas pertemuan sesuai kebutuhan.

3. Ouput

Indikator: Jumlah kegiatan yang sesuai dengan peran masing-masing.

4. Outcome

Indikator: Adanya penurunan masalah.

Hasil atau manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dari adanya kemitraan (Hafsah: 2009):

1. Produktivitas

Produktivitas akan meningkatkan kualitas maupun kuantitas hasil kemitraan.

2. Efisiensi

Kemitraan dapat menghemat waktu dan tenaga dalam pelaksanaannya.

3. Jaminan kualitas, kuantitas dan kontinuitas

Kualitas, kuantitas dan kontinuitas sangat erat kaitannya dengan efisiensi dan produktivitas sebagai pendorong kemitraan.

4. Resiko

Kemitraan dapat mengurangi resiko sehingga semua pihak kemitraan dapat menanggung resiko

5. Ketahanan Sosial

Kemitraan sebagai bentuk upaya pemberdayaan.

Adapun kritrik dari adanya kemitraan:

Indikator:

- a. Kurang memikirkan manfaat jangka panjang
- b. Ukuran kinerja jangka pendek
- c. Tidak adanya dana
- d. Kebutuhan politik
- e. Prosedur sistem
- f. Kurangnya inovasi
- g. Berbagai keberagaman yang menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan karena pemerintahan lokal tidak dipercaya dan kebijakan tidak memihak lokal

1.9 Metodologi Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian *mixed method* dengan studi kasus. Alasan utama menggunakan tipe penelitian *mixed method* ini karena peneliti ingin mendalami sekaligus mengukur fenomena situasi, proses, peristiwa dan interaksi yang terjadi di lapangan dengan menggunakan beberapa variabel dan indikator.

Penelitian kualitatif adalah suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam suatu fenomena atau kasus yang berkaitan dengan fokus penelitian yang akan didalami. Penelitian kualitatif penting dilakukan karena dapat mengungkap 6 hal antara lain: a) memahami mendalami makna (*meaning*) tertentu, b) memahami dan mendalami konteks tertentu, c) mengidentifikasi segala fenomena yang belum diantisipasi, d) memahami fenomena yang terjadi di balik fenomena, e) mendeskripsikan penjelasan kausalitas, f) mendeskripsikan pola-pola yang ada. (Creswell, 2009: 175, 195-196)

Pendekatan kuantitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap fenomena sosial. Untuk dapat melakukan pengukuran, setiap fenomena sosial dijabarkan kedalam beberapa komponen masalah variabel dan indikator. Setiap variable yang di tentukan di ukur dengan memberikan *symbol – symbol* angka yang berbeda – beda sesuai dengan kategori informasi yang berkaitan dengan variable tersebut. Dengan menggunakan *symbol – symbol* angka tersebut,

teknik perhitungan secara kuantitatif matematik dapat di lakukan sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku umum di dalam suatu parameter. Jadi, yang diukur dalam penelitian sebenarnya ialah bagian kecil dari populasi atau sering disebut “data”. Data ialah contoh nyata dari kenyataan yang dapat diprediksikan ke tingkat realitas dengan menggunakan metodologi kuantitatif tertentu. Penelitian kuantitatif mengadakan eksplorasi lebih lanjut serta menemukan fakta dan menguji teori-teori yang timbul (Sumanto, 1995).

Tabel 5. Metode Penelitian

Aspek	Kualitatif	Kuantitatif
Rumusan Masalah	Pelaksanaan kemitraan antara Desa Dalangan dengan Desa Jimus dan Desa Ngaran dalam program pamsimas	Manfaat yang dirasakan masyarakat serta kritik dari adanya kemitraan antara Desa Dalangan dengan Desa Jimus dan Desa Ngaran dalam program pamsimas
Tujuan	Untuk menjelaskan secara mendalam pelaksanaan kemitraan antara Desa Dalangan dengan Desa Jimus dan Desa Ngaran dalam program pamsimas	Untuk mengukur fenomena suatu peristiwa yang berhubungan dengan manfaat yang dirasakan masyarakat serta kritik dari adanya kemitraan antara Desa Dalangan dengan Desa Jimus dan Desa Ngaran dalam program pamsimas
Metode	Wawancara	Kuesioner
Sumber informan	Ketua BP SPAMS Desa Dalangan, Desa Jimus dan Desa Ngaran	Masyarakat Desa Dalangan, Desa Jimus dan Desa Ngaran

Waktu	22 November 2017-24 November 2017	22 November 2017-1 Desember 2017
-------	--------------------------------------	-------------------------------------

1.9.2 Lokasi dan Obyek Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Klaten dengan obyek penelitian mengenai kemitraan pemerintah daerah dengan masyarakat dalam menciptakan partisipasi aktif dari masyarakat adalah pemerintah desa maupun masyarakat Desa Dalangan, Desa Jimus dan Desa Ngaran.

Obyek penelitian ini juga berhubungan dengan pihak-pihak yang terlibat secara langsung di dalam kemitraan penyediaan pelayanan publik khususnya kemitraan yang menghasilkan partisipasi masyarakat secara aktif. Untuk memperdalam kajian, aktor-aktor utama dalam pemerintah desa dan Ketua BP SPAMS ketiga desa diminta untuk menjelaskan mengenai pelaksanaan kemitraan yang telah dilakukan dalam rangka penyediaan air. Mengenai partisipasi masyarakat dari adanya kemitraan tersebut dan mengenai hasil yang dicapai dari adanya kemitraan tersebut. Aktor-aktor utama dalam masyarakat Desa Dalangan, Desa Jimus dan Desa Ngaran juga diminta mengisi kuesioner dari adanya manfaat kemitraan dan juga kritik dari kemitraan tersebut.

Sampel dari penelitian ini adalah masyarakat Desa Dalangan, Desa Jimus dan Desa Ngaran.

1.9.3.1 Penentuan Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik *Probability sampling* yaitu *Stratified Random Sampling*, dimana metode ini digunakan bila populasi mempunyai anggota/unsur yang heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan (strata). Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{(1 + N(e)^2)}$$

n = ukuran sampel

N = populasi (jumlah penduduk Desa Dalangan, Desa Jimus dan Desa Ngaran)

e = tingkat presisi yang ditetapkan

Dalam penelitian ini digunakan tingkat presisi ketidaktelitian 10% sehingga ukuran sampel dalam penelitian ini yaitu:

N Desa Dalangan : 3098 orang

N Desa Jimus : 906 orang

N Desa Ngaran : 2261 orang

Jumlah N : 6265 orang

$$n = \frac{N}{(1 + N(e)^2)}$$

$$n = \frac{6265}{(1 + 6265(0.01))}$$

$$n = 98.4$$

Dari perhitungan diatas, maka diperoleh jumlah sampel minimum sebanyak 98.4 responden, Untuk mempermudah perhitungan peneliti membulatkan jumlah responden menjadi 100 responden. Karena menggunakan teknik probabilitas sampel acak berstrata, maka ada penarikan sampel yang berimbang untuk setiap strata, dari 100 responden terdapat 50 responden laki-laki dan 50 responden perempuan.

Teknik Pengambilan Sampel

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian kuantitatif ini adalah skala ordinal. Skala ordinal adalah data yang berasal dari kategori yang disusun secara berjenjang mulai dari tingkat rendah sampai tertinggi ataupun sebaliknya dengan jarak atau rentang yang tidak harus sama. Sedangkan skala pengukuran instrumen penelitian menggunakan *skala likert*. *Skala likert* adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu (Siregar, 2013: 23-25)

Dengan menggunakan *skala likert*, maka variabel yang diukur dijabarkan dari variabel menjadi dimensi, dari dimensi dijabarkan menjadi indikator, dan dari indikator dapat dijabarkan menjadi sub indikator yang dapat diukur. Akibatnya sub indikator dapat dijadikan tolak ukur membuat suatu pertanyaan yang perlu dijawab oleh

responden. Cara pengambilan sampel acak berstratifikasi ini dapat menggambarkan secara tepat sifat populasi yang heterogen. Mula-mula populasi harus dibagi dalam tahap atau lapisan (strata) tertentu, kemudian sampel diambil dalam setiap strata sesuai dengan proporsinya dalam perbandingan tertentu. Proporsi yang terbesar tentu mendapat sampel terbesar, sedangkan proporsi kecil akan mendapatkan sampel yang kecil pula. (Eriyanto: 1999)

Untuk mengetahui responden dari Desa Dalangan, Desa Jimus dan Desa Ngaran yaitu dengan cara mengetahui terlebih dahulu strata, disini saya mengambil strata berdasarkan jumlah dusun dari masing-masing desa. Setelah mengetahui jumlah dusun, saya juga harus mengetahui proporsi jumlah laki-laki dan proporsi jumlah perempuan. Untuk menentukan sampel yaitu dengan cara membandingkan jumlah laki-laki dan perempuan yang masing-masing 50% yang diambil dari masing-masing dusun sesuai dengan proporsi perbandingan.

Tabel 6. Teknik Sampling Berstrata

Desa	Dalangan						Jimus			
Jumlah penduduk	3098						906			
Perbandingan Persentase	50%						14%			
Pembagian dari 100 Responden	50						14			
Jumlah Populasi Laki-laki dan Perempuan	25 Laki-laki			25 Perempuan			7 Laki-laki		7 Perempuan	
Dusun	1	2			3			1	2	
Jumlah penduduk masing-masing dusun	958	1034			1106			409	497	
Perbandingan Persentase	31%	33%			36%			45%	55%	
Jumlah sampel	15	17			18			6	8	
Sampel Laki-laki dan Perempuan	8 L	7 P	8 L	9 P	9 L	9 P	3 L	3 P	4 L	4 P

Desa	Ngaran					
Jumlah penduduk	2261					
Perbandingan Persentase	36%					
Pembagian dari 100 Responden	36					
Jumlah Populasi Laki-laki dan Perempuan	18 Laki-laki			18 Perempuan		
Dusun	1		2		3	
Jumlah penduduk masing-masing dusun	776		636		849	
Perbandingan Persentase	34%		28%		38%	
Jumlah sampel	12		10		14	
Sampel Laki-laki dan Perempuan	6 L	6 P	5 L	5 P	7 L	7 P

1.9.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian dengan metode campuran (*mix method*) jenis data yang disajikan dalam penelitian ini adalah berbentuk menarik maupun deskripsi berupa teks, kata tertulis atau simbol-simbol yang menggambarkan serta mempresentasikan proses pelaksanaan kemitraan dan hasil yang diterima masyarakat dengan adanya kemitraan dari masing-masing pemerintah desa dalam program pamsimas.

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian yakni data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data, informasi atau fakta yang diperoleh secara langsung dari informan yang diteliti yakni berupa jawaban-jawaban langsung dari berbagai pertanyaan atau informasi yang diperoleh dari lapangan. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi berbagai fakta dan informasi yang diungkapkan oleh informan berkaitan dengan pertanyaan mengenai kemitraan desa dalam program pamsimas.

Data sekunder adalah data, informasi atau fakta yang bersumber dari dokumen, buku-buku, laporan, jurnal, artikel, catatan dan sebagainya yang telah dilakukan oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi berbagai informasi atau data yang menyangkut kemitraan desa dalam program pamsimas.

1.9.5 Informan Penelitian

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya di dalam tinjauan pustaka bahwa kemitraan menyangkut dua aktor atau lebih yang bisa diklasifikasikan menjadi satu kelompok yaitu aktor pemerintah desa maupun masyarakat desa. Berdasarkan hal tersebut maka informan di dalam penelitian ini dibagi ke dalam satu kelompok besar, yakni: Informan kelompok Ketua BP SPAMS Desa Dalangan, Desa Jimus, Desa Ngaran dan masyarakat Desa Dalangan, Desa Jimus dan Desa Ngaran.

1.9.6 Informan Kelompok Pemerintah Desa dan Masyarakat

Kelompok aktor pemerintah adalah Ketua BP SPAMS Desa Dalangan, Desa Jimus dan Desa Ngaran. Selain berasal dari aktor tersebut, informan penelitian ini juga berasal dari kelompok masyarakat dimana informan ini dipilih berdasarkan kelompok masyarakat yang terlibat secara langsung di dalam fokus penelitian ini.

Tabel 7. Daftar Informan dan Data yang diperoleh

Informan	Jumlah Orang	Informasi/Data yang diperoleh
Aparatur Desa termasuk Ketua BP SPAMS tingkat desa (Desa Dalangan, Desa Jimus dan Desa Ngaran)	3 orang	Informan Kunci
Masyarakat Desa Jimus dan Desa Ngaran	100 orang	Informan Kunci
Jumlah keseluruhan	103 orang	

1.9.7 Teknik Pengumpulan Data

Sebuah penelitian memerlukan teknik pengumpulan data sebagai upaya mengumpulkan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti berdasarkan fokus penelitian. Terdapat empat langkah yang harus dilakukan untuk menggunakan teknik pengumpulan data menurut Creswell antara lain mengidentifikasi lokasi atau tempat dimana penelitian akan dilakukan, menentukan aktor yang akan diwawancarai, kegiatan apa yang dikerjakan oleh aktor tersebut, serta proses yang terjadi di dalam kegiatan tersebut. (Creswell, 2009: 185).

Lokasi yang diamati dalam penelitian ini adalah Desa Dalangan, Desa Jimus dan Desa Ngaran dengan aktor-aktor yang akan diwawancarai adalah para pihak yang terlibat di dalam kemitraan desa dalam program pamsimas seperti Ketua BP SPAMS Desa Dalangan, Desa Jimus dan Desa Ngaran dan dengan menyebar kuesioner kepada masyarakat Desa Dalangan, Desa Jimus dan Desa Ngaran. Kegiatan yang ingin dijadikan fokus penelitian adalah kemitraan antara Desa Dalangan dengan Desa Jimus dan Desa Ngaran dalam Program Pamsimas. Sedangkan prosesnya adalah proses, manfaat dan kritik yang dihasilkan dari kemitraan antara Desa Dalangan dengan Desa Jimus dan Desa Ngaran dalam Program Pamsimas.

Langkah selanjutnya adalah teknik pengumpulan data (Creswell, 2010: 266-271) mengenai kemitraan antara Desa Dalangan dengan Desa Jimus dan Desa Ngaran dalam Program Pamsimas yang dilakukan melalui 3 (tahap) yang meliputi wawancara mendalam (*in-depth interview*), kuesioner dan dokumentasi (*documentation*).

a. Wawancara mendalam (*in-depth interview*)

Proses pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara. Wawancara dilakukan secara terbuka terhadap para informan. Metode ini dilakukan secara mendalam terhadap masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Dalam mengumpulkan data menggunakan metode wawancara, peneliti mempersiapkan

pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu yang dibutuhkan untuk mengungkapkan permasalahan, alat perekam dan *blocknote*.

a. Kuesioner

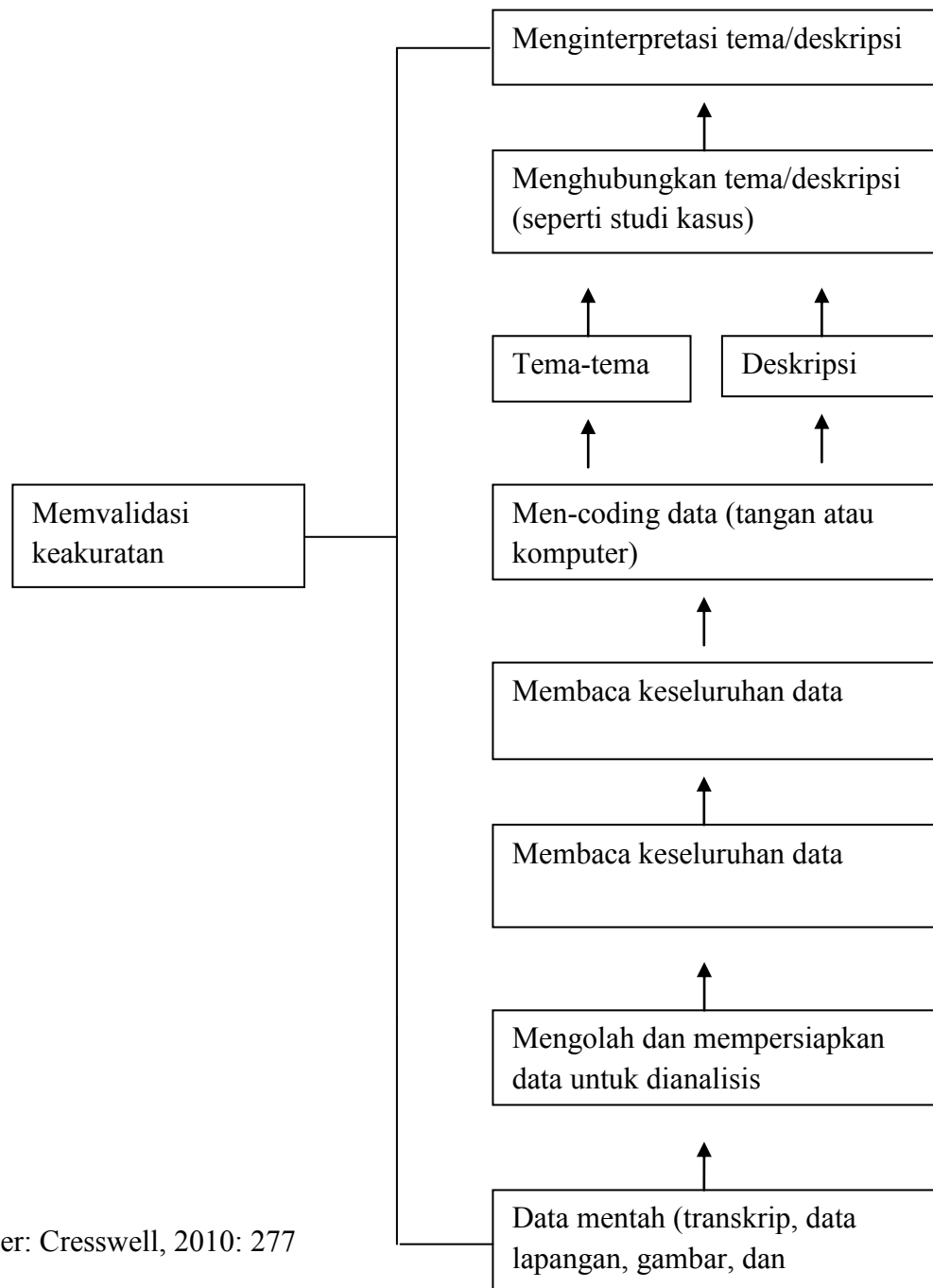
Teknik pengumpulan data yang dimana memeberikan pertanyaan-pertanyaan berupa kertas kuesioner yang digunakan penulis dalam mengukur tingkat kepuasan masyarakat khususnya mengenai hasil dari proses kemitraan.

b. Dokumentasi (*documentation*)

Proses pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan mengabadikan fenomena di lapangan saat berkunjung ke lokasi atau obyek penelitian, sehingga hasil penelitian lebih mudah dimengerti oleh pembaca. Selain itu, dokumen ini dapat diperoleh dari data hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga hasil penelitian akan menjadi lebih akurat.

1.9.8 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode dari Creswell.



Sumber: Creswell, 2010: 277

Sedangkan untuk interpretasi atau pengujian data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan empat macam kriteria untuk memberikan validasi yang akurat terhadap data yang telah didapat antara lain; (Polit & Beck, 2004) *Credibility* (derajat kepercayaan), *Dependability* (kebergantungan), *Confirmability* (kepastian), dan *Transferability* (keteralihan).

a. *Credibility* (Derajat Kepercayaan)

Uji kredibilitas data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan fokus dalam pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman dengan menggunakan *membercheck*. *Membercheck* ini memberikan kesempatan kepada partisipan apabila ingin merubah, menambah, atau mengurangi jawaban saat wawancara secara langsung dilakukan (Sugiono, 2007).

b. *Dependability* (Kebergantungan)

Dependability merupakan kestabilan data dari waktu ke waktu dan pada tiap kondisi. Salah satu teknik untuk mencapai *dependability* data adalah *inquiry audit*, yaitu peneliti meneliti kembali data-data yang mendukung validasi data. Data-data lain yang mendukung peneliti yaitu mengambil dari teori dan konsep sebelumnya.

c. *Confirmability* (Kepastian)

Confirmability merupakan objektivitas atau netralitas data, dimana data yang diperoleh merupakan hasil jawaban yang sama dari partisipan tentang relevansi data.

d. *Transferability* (Keteralihan)

Transferability maksudnya adalah hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah daerah lain dalam melaksanakan strategi kemitraan dengan latar belakang yang hampir sama dengan dilakukannya penelitian ini.

1.9.8.1. Uji Validasi Data

Uji validitas digunakan untuk menunjukkan tingkat kehandalan dan kesahihan suatu instrumen. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk memperoleh data tersebut adalah valid. Begitupun sebaliknya (Sugiyono, 2012: 137). Uji validitas instrumen dapat menggunakan rumus korelasi dengan menggunakan SPSS 18.0 metode *Pearson Product Moment*.

1.9.8.2. Uji Reliabilitas Data

Uji reliabilitas menyatakan bahwa apabila instrument yang digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Menurut Sugiyono (2012:122) uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan derajat konsistensi/ keajengan data dalam interval waktu tertentu. Pengujian reliabilitas kuesioner dilakukan dengan menggunakan SPSS 18.0 metode *Alpha Cronbach(α)* (Sugiyono, 2007:177) Untuk mengetahui suatu instrumen dinyatakan reliabilitas, kuesioner dinyatakan reliabel

jika mempunyai nilai *alpha* yang lebih besar dari 0,60. Kriteria untuk menilai reliabilitas instrumen penelitian menurut Nunnally (Ghozali, 2007:42) bahwa "Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60".

1.9.9 Kualitas Data

Keabsahan data yang diperoleh saat melakukan pengumpulan data merupakan kunci utama dan merupakan faktor penentu dari sebuah penelitian, karena apabila sebuah data yang diperoleh diragukan keabsahannya maka penelitian tersebut menjadi tidak valid. Keabsahan data dapat diperoleh dengan proses pengumpulan data yang tepat. Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi, yaitu teknik untuk memeriksa keabsahan data untuk pengecekan atau pembandingan terhadap data tersebut. Menurut Patton (Moleong, 2001: 32) terdapat empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi Data

Yaitu dengan menggali kebenaran informasi melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Dapat menggunakan sumber data seperti dokumen, arsip, catatan resmi yang merupakan lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Masing-masing cara tersebut akan menghasilkan bukti dan selanjutnya akan

memberikan pandangan mengenai fenomena yang diteliti sehingga menghasilkan keluasan pengetahuan.

2. Triangulasi antar Peneliti

Yaitu dengan menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Tetapi perlu diperhatikan bahwa orang yang diajak untuk menggali data harus merupakan orang yang benar-benar memahami fokus penelitian.

3. Triangulasi Teori

Yaitu dengan menggali kebenaran informasi melalui metode dan sumber perolehan data guna memastikan data yang telah diperoleh memenuhi syarat. Dalam triangulasi teori, peneliti dituntut untuk memiliki *expert judgement* ketika membandingkan temuannya dengan persepektif tertentu.

4. Triangulasi Metode

Yaitu penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal seperti metode wawancara, observasi dan survey. Untuk memperoleh kebenaran informasi, peneliti dapat menggunakan informan yang berbeda, sehingga melalui pandangan yang berbeda maka diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenarannya.